

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
JERUK SIEM DALAM PENINGKATAN PRODUKSI JERUK SIEM
DI DESA LAMBODI JAYA KECAMATAN LALEMBUU
KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

M. RIFAI GUNAWAS

NIM. 015227512

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2011**

ABSTRACT

An Analysis Orange Developmental Implementation Policy In Increasing Orange Production at Lambodi Jaya Village Lalembuu Sub District South Konawe Regency

M. Rifai Gunawas

Universitas Terbuka

rifaigunwas@gmail.com

Key words: Policy implementation, Communication, Resource, Implementor attitude, Jobs Streaming manner, Thruster factor, Resistor factor.

The aim of the study was to analyze orange developmental implementation policy In increasing orange production at Lambodi Jaya Village Lalembuu Sub District South Konawe Regency and to analyze factors influencing policy implementation.

Orange development directed to rendering farming efficient and effective, so most composes farmer revenue enhancement and orange result that gets competitiveness, via increasing productivities activity and orange quality. This policy implementation rendered in form Budget Performing Foam (DIPA) via agribusinesses developmental program with objective: Increasing it production, productivity and horticulture quality product that gets agribusiness knowledge via patterns Direct Society Help (BLM).

There is four aspect that constitute precondition for success to process implementation which is: Communication, Resource, Implementor attitude, Structure / job flow Manner / Operational Procedure Default (SPO).

In implementation policy exists supporting and resistor factor. There is supportive factor are : (1) lead supports, (2) Implementer commitments, (3) ability organizational implementer, (4) society support or target groups. Be resistor factor: (1) a lot of the interesting agents, (2) double exists support, (3) partnership program, (4) decision making ladders.

Research population is orange farmer at Lambodi Jaya Village Lalembuu sub district. Sample in observational it is orange developmental participant farmer by patterns BLM as much 45 person that is taken by use of tech total sampling that is gone upon on given judgment that made by researcher bases characteristic or population character already be known previous. Data collecting tech at the site is questionnaire and interview. Data Analysis techniques is qualitative descriptive

Result of Research shows: Communications, Executor Resource, Executor Attitude, Arrange the Stream Work to partake to determine the efficacy development of orange policy implementation in orange product increase.

Resistor factor in implementation: perpetrator in concerned quite a lot so that influences the activity of counseling. There are double exists support from farmer, existence of choice of is way of and other; dissimilar method executed besides method, way of and also mechanism from program which implementation. Partner program not yet taken place better. Result of research known that since policy implementation program the development of

orange executed, there is no related institution dissimilar to braid the partner program to farmer. Uncommitted decision making ladder better.

Supporting factor in implementation; *lead support* , *executor commitment*, *executor institution ability and society support* passably deep orange developmental policy implementation siem. This condition of at indication in guidance application, administration counselling at the site a portion farmer was successful exhaustive mengimplementasikan program and activity already being passed on. *Executor institution ability* in mengimplementasikan programs siem's lemon development was good, even still have again been optimized. Usufruct that expressed interview executor institution ability in implementation programs siem's lemon development have wheter regarding is seen from process and working procedure flank, since mechanism and performing step corresponded to operational default procedures (SOP) whatever available. *Society support* for implementation to program was good, it at indication by there are many respondent declares for to accept implementation orange development program because have understood aim of program implementation.

ABSTRAK

Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Jeruk Siem Dalam Peningkatan Produksi Jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

M. Rifai Gunawas

Universitas Terbuka

rifaigunws@gmail.com

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana,
Tata Aliran Kerja, Faktor Pendorong, Faktor Penghambat

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakannya. Pengembangan tanaman jeruk siam diarahkan pada upaya mewujudkan usaha tani yang efisien dan efektif, sehingga tercipta peningkatan pendapatan petani dan hasil jeruk siem yang berdaya saing, melalui kegiatan peningkatan produktivitas dan mutu jeruk. Kebijakan ini diimplementasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui program pengembangan agribisnis dengan sasaran : Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura yang berwawasan agribisnis melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Implementasi sebagai suatu proses pelaksanaan administrasi dalam arti luas yang dapat dipahami pada tingkat yang lebih khusus dari suatu program. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada empat aspek merupakan prasyarat bagi keberhasilan proses implementasi yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Sikap pelaksana, Struktur /Tata aliran kerja/Standar Prosedur Operasional (SPO).

Pada tahap implementasi terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung : (1) dukungan pimpinan, (2) komitmen para pelaksana, (3) kemampuan organisasi pelaksana, (4) dukungan masyarakat atau kelompok sasaran. Faktor penghambat : (1) banyaknya pelaku yang terlibat, (2) terdapatnya loyalitas ganda, (3) kemitraan program, (4) jenjang pengambilan keputusan.

Populasi penelitian adalah petani jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu. Sampel penelitian adalah petani peserta pengembangan jeruk siem dengan pola BLM/BPLM sebanyak 45 orang, diambil dengan menggunakan teknik total sampling didasarkan dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dan wawancara. Teknik Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Komunikasi, Sumber Daya Pelaksana, Sikap Pelaksana, Tata Aliran Kerja turut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam peningkatan produksi jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Faktor penghambat dalam implementasi : *pelaku yang terlibat cukup banyak* sehingga mempengaruhi kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan. Terdapat *loyalitas ganda* dari petani, adanya pilihan cara dan metode lain yang dilaksanakan selain metode, cara serta mekanisme dari program yang diimplementasikan. *Kemitraan program* yang belum berlangsung dengan baik. Hasil penelitian diketahui bahwa sejak implementasi kebijakan program pengembangan jeruk siem dilaksanakan, belum ada upaya dari instansi/lembaga terkait lain untuk menjalin kemitraan program tersebut ke petani. *Jenjang pengambilan keputusan* belum dilaksanakan dengan baik.

Faktor pendorong dalam implementasi ; *dukungan pimpinan, komitmen pelaksana, kemampuan instansi pelaksana dan dukungan masyarakat* cukup baik dalam implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem. Kondisi ini ditunjukkan dalam pemberian bimbingan, penyuluhan tata kerja di lapangan sebagian petani telah berhasil mengimplementasikan program dan kegiatan yang sudah disampaikan. *Kemampuan instansi pelaksana* dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem sudah baik, meskipun masih harus dioptimalkan lagi. Hasil wawancara terungkap bahwa kemampuan instansi pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik jika dilihat dari sisi proses dan prosedur kerja, karena mekanisme dan tahapan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Sedangkan dari sisi sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan lagi utamanya sisi kualitasnya. *Dukungan masyarakat* terhadap implementasi program sudah baik, hal ini ditunjukkan oleh banyak responden menyatakan menerima implementasi program pengembangan jeruk karena telah memahami tujuan dari implementasi program.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Jeruk Siem Dalam Peningkatan Produksi Jeruk Siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

NAMA : M. Rifai Gunawas

NIM : 015227512

PROGRAM STUDI : Administrasi Publik

Pembimbing I

Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS.
NIP. 19640323 1989021002

Pembimbing II

Prof. Dr. Wempy Banga, M.Si.
NIP. 131 430 796

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik**

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

Sociati, M.Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : **M. Rifai Gunawas**
NIM : **015227512**
PROGRAM STUDI : **Administrasi Publik**
JUDUL TAPM : **Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Jeruk Siem Dalam Peningkatan Produksi Jeruk Siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.**

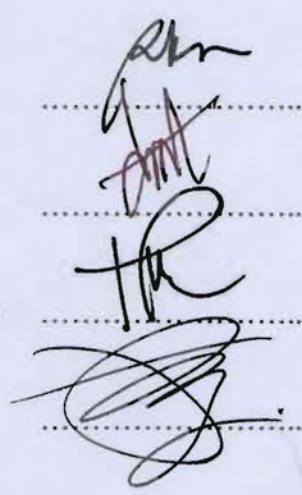
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Univesitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Kamis 19 Mei 2011
Waktu : 13.27:Wita – 17.27 Wita

Dan Telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji
Nama : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
Penguji Ahli
Nama : M. Qudrad Nugraha, Ph.D
Pembimbing I
Nama : Prof. DR. Laode Harafa, SE, MS
Pembimbin II
Nama : Prof. DR. Wempy Banga, M.Si



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Jeruk Siem Dalam Peningkatan Produksi Jeruk Siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan adalah hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Kendari, Mei 2011

Yang Menyatakan



M. Rifai Gunawas
NIM. 015227512

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM), yang berjudul ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JERUK SIEM DALAM PENINGKATAN PRODUKSI JERUK SIEM DI DESA LAMBODI JAYA KECAMATAN LALEMBUU KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Tujuan Penulisan ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan program pengembangan jeruk siam di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya peningkatan produksi dan kesejahteraan masyarakat tani.

Disadari sepenuhnya penulisan Tugas Akhir ini belum maksimal karena keterbatasan dan kemampuan penulis, oleh karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaannya.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Prof. Ir. Tian Belawati, MEd, Ph.D, selaku Rektor Universitas Terbuka yang mengizinkan penulis kuliah di Universitas Terbuka, Suciati, M.Sc, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Universitas Terbuka dan penulis ucapkan terima kasih kepada yang terhormat dosen pembimbing Prof. Dr. Laode Harafah, SE, MS dan Prof. Dr. Wempy Banga, M,Si, serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini.

Kendari, Mei 2011


M. Rifai Gunawas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM	vii
PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritik	
1. Teori Kebijakan	6
2. Teori Implementasi	11
3. Model Implementasi Kebijakan	17
B. Kebijakan Pengembangan Perkebunan dan Hortikultura	44
C. Kerangka Pikir Penelitian	46
D. Definisi Operasional	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	51
B. Populasi dan Sampel	51
C. Instrumen Penelitian	52
D. Prosedur Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis Data	53

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Kecamatan Lalembuu	54
	B. Implementasi Program Pengembangan Jeruk Siem	56
	C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem	79
	D. Implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dengan pola BLM/BPLM/PMUK	95
	E. Informasi produksi tanaman jeruk siem dan harganya di tingkat petani	96
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	100
	B. Saran	103
	DAFTAR PUSTAKA	104
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No		Halaman
Tabel 1.1	Perkembangan tanaman jeruk di Kab. Konawe Selatan tahun 2004-2006	2
Tabel 2.1	Penerima BPLM Satker Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra TA. 2005	46
Tabel 4.1	Jumlah desa di kecamatan Lalembuu menurut status tahun 2009	55
Tabel 4.2	Penggunaan lahan di kecamatan Lalembuu	56
Tabel 4.3	Tanggapan responden berdasarkan pernah tidaknya sosialisasi program pengembangan jeruk siem	57
Tabel 4.4	Intensitas interaksi antara petani dengan aparat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem	59
Tabel 4.5	Pernyataan responden mengenai sering tidaknya mereka melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah.....	60
Tabel 4.6	Pernyataan responden mengenai pemahaman mereka tentang implementasi program pengembangan jeruk siem	61
Tabel 4.7	Pernyataan responden berdasarkan penerimaan mereka terhadap program pengembangan jeruk siem	62
Tabel 4.8	Pernyataan responden mengenai pelaksanaan penyuluhan	63
Tabel 4.9	Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas	65
Tabel 4.10	Pernyataan responden mengenai kemampuan sumberdaya petugas dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan program	67
Tabel 4.11	Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas memberdayakan petani dan masyarakat lokal	68
Tabel 4.12	Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas mewujudkan sikap kebersamaan	70

Tabel 4.13	Pernyataan responden mengenai sikap pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.....	72
Tabel 4.14	Pernyataan responden mengenai sikap ramah pelaksana dalam memberikan pelayanan	74
Tabel 4.15	Pernyataan responden mengenai sikap pelaksana dalam memberikan penyuluhan.....	75
Tabel 4.16	Pernyataan responden mengenai sikap transparansi pelaksana dalam menjalankan program pengembangan jeruk siem	77
Tabel 4.17	Pernyataan responden mengenai kemudahan dalam mengurus kebutuhan program pengembangan jeruk siem	78
Tabel 4.18	Pernyataan responden mengenai banyaknya pelaku yang terlibat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem	80
Tabel 4.19	Pernyataan responden tentang kepercayaan mereka akan keberhasilan program pengembangan jeruk siem	83
Tabel 4.20	Pernyataan responden tentang kemitraan program pengembangan jeruk siem	85
Tabel 4.21	Pernyataan responden tentang keterlambatan penanganan permasalahan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem	86
Tabel 4.22	Dukungan pimpinan terhadap implementasi program pengembangan jeruk siem	88
Tabel 4.23	Komitmen pelaksana dalam implementasi program	89
Tabel 4.24	Kemampuan instansi pelaksana dalam implementasi program	91
Tabel 4.25	Dukungan masyarakat dalam implementasi program	93
Tabel 4.26	RUK Harapan Jaya	95
Tabel 4.27	RUK Mekar Sari	96

Tabel 4.28	Produksi jeruk siem , harga jual per kg dan harga yang diterima kelompok tani Mekar Sari.....	97
Tabel 4.29	Produksi jeruk siem , harga jual per kg dan harga yang diterima kelompok tani Harapan Jaya.....	99

Universitas Terbuka

DAFTAR GAMBAR

No		Halaman
1.	Skema Kerangka Pikir Penelitian.....	47

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan struktur perekonomian nasional. Selain sebagai penghasil produksi pangan dan pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sumber bahan baku industri, cadangan devisa dan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kerja dan menjadi sumber pendapatan sebagian besar penduduk di pedesaan, secara tidak langsung sektor pertanian juga telah ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan.

Struktur ekonomi Sulawesi Tenggara Tahun 2006 (BPS : Sultra Dalam Angka 2008 : 455) menunjukkan bahwa sektor Pertanian masih mempunyai peran tertinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku yaitu sebesar 40,73 persen, diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 14,06 persen, sektor Jasa-jasa sebesar 13,13 persen, sektor Pengangkutan dan komunikasi 7,61 persen dan diikuti oleh sektor-sektor lainnya.

Untuk terus mewujudkan peran tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit melalui Kebijakan Pembangunan Pertanian Sektoral, yang salah satunya ialah kebijakan pengembangan hortikultura yang merupakan salah satu kebijakan solutif untuk menunjang pengembangan produksi hortikultura dengan menetapkan komoditi unggulan yang meliputi : pisang, mangga, manggis, jeruk, durian, kentang, cabe merah, bawang merah dan anggrek/tanaman hias

Tanaman hortikultura merupakan salah satu kelompok komoditas yang mampu memberikan pertumbuhan tinggi dalam perekonomian, dapat meningkatkan pendapatan petani meskipun dalam luasan dan jumlah yang relatif tidak begitu besar, namun dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan petani yang efektif.

Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara memberi perhatian terhadap pengembangan hortikultura menjadi prioritas, khususnya pada komoditas unggulan yang dikembangkan melalui implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dilakukan dengan sistem perwilayahan sentra produksi yaitu Buton, Muna dan Konawe Selatan, dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian agroklimat dan kondisi wilayah.

Kebijakan program pengembangan hortikultura tersebut berupa pengembangan tanaman jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan melalui dana APBN. Implementasi program ini pengalokasiannya berdasarkan hasil analisis kesesuaian agroklimat.

Tabel 1.1
Perkembangan tanaman jeruk di Kabupaten Konawe Selatan tahun 2004-2009

Tahun	Pohon yang menghasilkan (phn)	Produksi (kuintal)
Kab. Konawe Selatan		
2004	31.964	7.380
2005	16.798	13.260
2006	38.320	24.673
2007	27.555	17.742
2008	24.335	17.216
2009	584.101	134.778

Sumber : Statistik Hortikultura Disbunhorti Sultra 2009.

Dari tabel tersebut menunjukkan produksi komoditi jeruk di Kabupaten Konawe Selatan menunjukkan peningkatan dari 7.380 kuintal di tahun 2004 kemudian meningkat menjadi 24.673 kuintal di tahun 2006, kemudian peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009 terdapat 584.101 pohon jeruk yang menghasilkan dengan produksi 134.778 kuintal. Belum diketahui apakah peningkatan tersebut merupakan hasil dari implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem di Kabupaten Konawe Selatan, sekaligus juga menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

(Hariyono : 2005) mengemukakan hasil analisis terhadap lima faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan kawasan industri, yaitu jenis manfaat yang diterima target groups, perubahan yang diinginkan oleh kebijakan, sumber daya, komunikasi serta kondisi sosial politik dan ekonomi. Analisis implementasi kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan gabungan antara model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dan George C. Edward III.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan model implementasi yang dikemukakan George Edward III, perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang dikemukakan (Warwick dalam Aries 2009:24)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam upaya peningkatan produksi jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a) Menganalisis implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.
- b) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam peningkatan produksi jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara :

- a) Secara praktis sebagai masukan bagi Pemerintah dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan jeruk siem sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan petani.

- b) Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan khasanah pengetahuan di bidang kebijakan publik dan menjadi acuan bagi penelitian lain yang berhubungan dengan kebijakan publik khususnya implementasi kebijakan di bidang pengembangan tanaman jeruk siem di masa-masa mendatang.

Universitas Terbuka

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Teori Kebijakan

Kebijakan menurut Didjaja (1992:16-17) merumuskan bahwa:

kebijakan adalah keputusan suatu organisasi (publik atau bisnis) yang bertujuan mengatasi permasalahan tertentu atau mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku (a) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun unit organisasi pelaksana kebijakan dan (b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan, baik berhubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksud.

Sementara Kebijakan Negara menurut Sumaryadi (2005:19) adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam kepustakaan Internasional kebijakan publik disebut dengan *public policy*. Kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari upaya manusia untuk mengetahui sesuatu, untuk mengatasi sesuatu masalah, atau untuk mencapai sejumlah tujuan. Dewasa ini istilah kebijakan publik secara luas dapat dipahami bahwa pengertian kebijakan publik yang diberikan oleh para pakar sangat bervariasi. Menurut Dunn (1976) dalam Hariyoso (2002:59)

“A public policy is an authoritative guide for carrying out governmental public action in the state, regional, local and municipal jurisdiction by legislative enactment, administrative regulation, implementation, support of general populace and affect citizen within a given jurisdiction”.

Kebijakan publik ditafsirkan sebagai arahan otoritatif bagi penyelenggaraan tindakan pemerintahan dalam wilayah Negara, propinsi, kabupaten dan kota yang dikukuhkan oleh ketetapan legislatif, aturan main administrasi, dukungan publik yang mempunyai pengaruh terhadap warga masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan.

Selanjutnya Chief J.O. Udoji dalam Wahab, (2004:5) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Kismartini dkk. (2007:16) mengemukakan : Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kali dijabarkan kedalam bentuk program dan proyek-proyek.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam atau luar pemerintah.
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi input berupa sumberdaya baik manusia maupun bukan manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintah, baik pejabat maupun instansi pemerintah, yang merupakan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- 1) Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan
- 2) Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- 3) Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Namun demikian berdasarkan prespektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan, memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan.

Dikatakan oleh Dunn, (2003:89) bahwa :

analisis kebijakan (*Policy Analysis*) dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada satu tonggak sejarah ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukannya pengujian secara eksplisit dan reflektif kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins didalam buku *The Policy Process* sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu.

Dengan demikian kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Oleh karena itu kebijakan dalam pandangan Lasswell dan Kaplan yang dikutip Abidin (2004: 21) adalah

sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik.

Disamping itu terdapat pula definisi kebijakan yang dikemukakan oleh :

- Thomas R. Dye dalam Hermani (1997 : 24) bahwa : *Public Policy is whatever governments choose to do* (semua pilihan atau tindakan apa pun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak melakukan sesuatu.
- Edwards dan Sharkansky dalam Hermani (1997:31) bahwa : Kebijakan negara adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya yang merupakan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dari program dan peraturan-peraturan.
- William N. Dunn dalam Hermani (1997:27-28) kebijaksanaan publik sebagai berikut : Kebijaksanaan publik (*Public Policy*) adalah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya.
- Erwan Agus Purwanto dalam Safrina (2003 : 19) bahwa kebijakan publik berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak dan anggaran.

- Chief. J. O Udoji dalam Widiastuti (2006 : 23) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.
- Hall dan Quinn (1985:15) "*Public policy(policies) are the use by of its resources to intervene into accustomed behavior of some citizen to produce more or less of the of the behavior behave as their government wishws. Oriented towards the achievements of value ends, chose and opportunity costs*".

Kebijakan publik merupakan pemanfaatan strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada oleh rejim pemerintah sebagai pembinaan perilaku masyarakat guna memecahkan masalah-masalah publik. Dengan demikian kebijakan publik dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kepentingan kelompok masyarakat tertentu agar dapat berperan dalam pembangunan maupun setiap tindakan yang dikerjakan oleh pemerintah. Pada akhirnya kebijakan publik adalah mengatur kehidupan bersama untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.

Beberapa pengertian di atas memperlihatkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sehingga bukan hanya keputusan untuk melakukan sesuatu yang dapat disebut sebagai kebijakan publik. Keputusan untuk tidak melakukan

sesuatu juga dapat disebut sebagai kebijakan publik, namun hal tersebut harus dilakukan dengan kesadaran dan bukan berupa ketidaksengajaan.

2. Teori Implementasi

Pengertian implementasi sebagai suatu proses dikemukakan oleh Presman dan Wildasky dalam Bahri (2004:5) bahwa implementasi merupakan proses interaksi antara pelaksanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan unsur yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan yang diinginkan.

Implementasi menurut Pressman dan Wildavsky dalam Nakamura, et.al, (1980:13) adalah *“to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”*. Dari pengertian ini implementasi dapat dikemukakan sebagai suatu kegiatan untuk menyempumakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan, yang berarti pula menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan dapat berhasil dilaksanakan.

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Sebagaimana rumusan dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam Wahab (2002:51) mengemukakan bahwa :

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya

diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan.

Berdasarkan pemahaman diatas, konklusi dari implementasi jelas mengarah kepada pelaksanaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi ini harus digaris-bawahi ada kata-kata “rangkaiian terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya implementasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrumen.

Grindle (1980:7) dalam Wibawa (1994:22) mengemukakan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. *Content of policy* mencakup sejauhmana kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; *Context of implementation* mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Bardach dalam Bahri (2004:6) mengemukakan batasan pengertian proses implementasi, sebagai berikut :

1. Proses penyusunan unsur-unsur spesifik yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu program;
2. Memainkan sejumlah peran yang saling berhubungan, dimana diambil unsur-unsur yang ada atau diberikan dalam proses penyusunan program secara khusus.

Selanjutnya Anderson (1976:72) menafsirkan implementasi kebijakan sebagai aplikasi dari kebijakan dalam mesin administrasi pemerintahan dalam menangani problematika. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya dengan melalui proses kebijakan publik sebagai berikut :

- (1) Formulasi masalah (*problem formulation*). Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
- (2) Formulasi kebijakan (*Formulation*). Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- (3) Penentuan kebijakan (*adoption*). Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
- (4) Implementasi (*implementation*). Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- (5) Evaluasi (*evaluation*). Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan.

Sedangkan Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- (1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

- (2) Formulasi kebijakan (*policy formation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- (5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, (2002) :

Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu dan dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan (hal. 102).

Menurut Edward III dalam Winarno, (2002:125), implementasi kebijakan adalah tahap perubahan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah-masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: seperti yang dikemukakan oleh Wahab (1997: 63) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Thompson dan Strickland (1992) dalam Nugraha (MAPU 5302: 8.46) mengemukakan kunci suksesnya implementasi strategis adalah menyatukan organisasi secara total untuk mendukung strategi dan melihat apakah setiap tugas administratif dan aktifitas dilakukan menurut cara yang memadukan secara tepat semua persyaratan sehingga pelaksanaan dari strategi itu dapat dinikmati.

Dengan adanya implementasi kebijakan, yang merupakan bentuk konkrit dari konseptualisasi dalam kebijakan formulasi, tidak secara otomatis merupakan garansi berjalannya suatu program dengan baik. Oleh karena itu suatu kebijakan implementasi pada umumnya satu paket dengan kebijakan pemantauan atau monitoring. Mengingat kebijakan implementasi adalah sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.

Selanjutnya Zamhuri dalam Mufti (2002:76) menyatakan bahwa ada tiga unsur penting yang perlu diperhatikan pada proses implementasi kebijakan yaitu

1. Adanya program yang dilaksanakan sebagai manifestasi dari kebijakan yang dibuat.
2. Adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya unsur pelaksana, baik organisasi maupun program yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan proses implementasi tersebut.

Implementasi merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan, dimana setelah suatu kebijakan ditetapkan dan memperoleh legitimasi secara hukum maka sebagai konsekuensinya kebijakan akan diaplikasikan dengan maksud untuk mempengaruhi masyarakat. Tahapan implementasi suatu program sering kurang memperoleh perhatian dari para ahli dan pembuat kebijakan, karena selama ini para pembuat kebijakan selalu beranggapan bahwa implementasi bukanlah tahapan yang penting dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut pandangan mereka, implementasi hanya sekedar pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan oleh para pembuat kebijakan. Dari pandangan demikian ini para pembuat kebijakan selalu beranggapan bahwa apabila suatu kebijakan telah dirumuskan, maka pada waktu diimplementasikan pasti akan menghasilkan dampak seperti yang direncanakan.

Sering terjadi distorsi dalam pencapaian sasaran program yang mau tidak mau menyadarkan para pembuat kebijakan bahwa implementasi merupakan tahapan yang sangat kritis yang harus diperhatikan apabila suatu program diharapkan dapat mencapai sukses sebagaimana yang direncanakan. Kemudian Salusu (1996:409) menegaskan bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu. Guna

merealisasikan pencapaian sasaran itu, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu.

3. Model Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Sumaryadi (2005:88) akan ditentukan oleh banyaknya variabel atau faktor dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan.

Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Dwidjowijoto (2003:158) bahwa : Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut.

a) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn (*The Top Down Approach*).

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2004:71-78) untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan publik secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksanaan tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.

Beberapa kendala (*constraints*) pada saat implementasi kebijaksanaan sering kali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijaksanaan dan badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin berupa fisik, misalnya program pembangunan pertanian disuatu wilayah terbengkalai dan mengalami kemacetan total lantaran musim kemarau yang berkepanjangan atau karena serangan hama penyakit. Ada pula hambatan-hambatan tersebut bersifat politis, artinya bahwa baik kebijaksanaan maupun tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melaksanakannya tidak diterima/tidak disepakati oleh berbagai pihak yang kepentingannya terkait yang memiliki kekuasaan untuk membatalkannya. Kendala-kendala semacam ini cukup jelas dan mendasar sifatnya, sehingga sedikit sekali yang bisa diperbuat oleh para administrator untuk mengatasinya.

2. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

Syarat kedua ini kerap kali muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Artinya, kebijaksanaan yang memiliki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena alasan terlalu banyak berharap dalam waktu yang terlalu pendek, khususnya persoalannya menyangkut

sikap dan perilaku. Alasan lainnya adalah bahwa para politisi kadangkala hanya peduli dengan pencapaian tujuan, namun kurang peduli dengan penyediaan sarana untuk mencapainya, sehingga tindakan-tindakan pembatasan/pemotongan terhadap pembiayaan program mungkin akan membahayakan upaya pencapaian tujuan karena sumber-sumber yang tidak memadai. Masalah lain yang biasa terjadi ialah apabila dana untuk membiayai pelaksanaan program sudah tersedia harus dapat dihabiskan dalam tempo yang amat singkat, kadang lebih cepat dari kemampuan program untuk secara efektif menyerapnya.

3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia

Persyaratan ketiga lazimnya mengikuti persyaratan kedua, artinya disatu pihak harus dijamin tidak terdapat kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan pihak lain pada setiap tahapan proses implementasinya perpaduan diantara sumber-sumber tersebut benar-benar dapat disediakan.

4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kasualitas yang handal.

Kebijaksanaan kadang kala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan lantaran karena ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, karena kebijaksanaannya telah didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditanggulangi. Sebab-sebab timbulnya masalah dan cara

pemecahannya; atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahan dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang itu.

5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

Dalam hubungan ini bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang hubungan sebab akibatnya tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin menjadi kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko yang akan dihadapi.

6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

Implementasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal (*single agency*), yang untuk keberhasilan misi yang diembannya, tidak perlu tergantung pada badan-badan lain, atau walaupun pelaksanaannya harus melibatkan badan/intansi lainnya, maka hubungan ketergantungan dengan organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya.

7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan terhadap tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan yang penting keadaan ini harus dapat dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas, spesifik dan lebih baik lagi apabila dapat dikualifikasikan, dipahami serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung.

8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat

Persyaratan ini mengandung makna bahwa dalam mengayunkan langkah menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-urutan yang tepat, seluruh tugas harus dilaksanakan oleh setiap yang terlibat.

9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna

Persyaratan ini menggariskan bahwa harus ada komunikasi dan koordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Koordinasi sudah barang tentu bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok dan lebih mendasar.

Dengan demikian maka perlu diciptakan suatu sistem yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan, yaitu dengan cara menterjemahkan tujuan kebijakan yang luas tersebut kedalam program-program kegiatan yang mengarah pada tercapainya tujuan kebijakan. Untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptakan berbagai macam program.

b) Model Van Meter dan Carl E. Van Horn (*A Model of the Policy implementation Process*).

Menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2005:99-101) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor.

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan menjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*). Dalam berbagai program pemerintah, keberhasilan maupun ketidak berhasilan banyak ditentukan oleh kualitas aparat pelaksanaannya.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial ekonomi dan politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni

pemahamannya terhadap kebijakan dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

c) Model implementasi George Edwards III

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan publik, Edward III mulai dengan mengajukan dua pertanyaan, yakni:

- a) *What is the precondition for successful policy implementation?*
- b) *What are the primary obstacles to successful policy implementation?*

George C. Edward III berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, disposisi. Dalam Winarno (2002:126-157) empat variabel tersebut adalah indikator-indikator yang dipergunakan sebagai sesuatu yang dapat diukur atau diteliti dalam implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi

Suatu persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Kemudian keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan atau perintah itu dapat diikuti. Berdasarkan etimologinya kata komunikasi berasal dari *communis* yang berubah menjadi *communicare* yang berarti menyebarkan atau

memberitakan informasi kepada pihak lain guna mendapatkan pengertian yang sama terhadap sebuah informasi, maka perlu ditetapkan suatu dasar titik temu yang sama Wursanto (2002 : 153). Sedangkan menurut Arifin (2000:5) komunikasi adalah penyampaian informasi, ide keterampilan peraturan dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Lebih jauh Wursanto (2002:155), mengatakan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian. Ada dua pengertian yang terkandung didalamnya yaitu proses dan informasi. Proses merupakan suatu rangkaian dari pada langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilalui dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Sementara yang dimaksud dengan informasi ialah segenap rangkaian perkataan, kalimat, gambar, kode atau tanda tertulis lainnya yang mengandung pengertian, buah pikiran atau pengetahuan apapun yang dapat dipergunakan oleh setiap orang yang mempergunakannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, baik dan tepat.

Komunikasi yang dilaksanakan antara aparat dan masyarakat serta instansi lain, dimana aparat berfungsi sebagai sarana pemerintah dalam menyampaikan program-program pembangunannya masih minimal, karena masyarakat mengerti apa yang dilaksanakan ada yang bersifat tidak informatif, yakni masyarakat tidak mengerti apa yang disampaikan tetapi juga persuasif, yakni masyarakat bersedia

menerima apa yang disampaikan, melakukan perbuatan atau kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan pembangunan.

Bagi suatu organisasi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide-ide diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi maka terdapat 3 (tiga) indikator pembahasan penting dalam komunikasi ini yaitu penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi, dan kejelasan komunikasi, yang dijelaskan sebagai berikut :

a) Penyaluran komunikasi

Seperti telah diuraikan di atas, keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya tidak terlepas dari faktor komunikasi. Agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif, maka saluran komunikasi dapat dirancang dengan baik sehingga informasi yang akan disalurkan mencapai sasaran. Ada beberapa saluran komunikasi dalam organisasi. Menurut Kasim (1989:71-77) pola komunikasi formal dapat diidentifikasi menjadi tiga yaitu :

1.1. Komunikasi ke bawah

Komunikasi ini adalah komunikasi yang berasal dari pimpinan tertinggi ditujukan kepada pimpinan menengah, kepada manajemen tingkat rendah dan terus kepada para bawahan. Fungsinya adalah untuk memberi pengarahan,

instruksi, evaluasi dan sebagainya. Makin rendah tingkat hierarki makin rinci perintah atau instruksi yang dikomunikasikan.

Disamping mengkomunikasikan perintah, komunikasi kebawah juga berkaitan dengan informasi tentang tujuan organisasi, kebijakan, peraturan, insentif, manfaat, hak-hak khusus, umpan balik dari atasan atas hasil pelaksanaan tugas bawahan dan sebagainya. Media yang dipakai untuk komunikasi meliputi rapat, telepon, memo, dan pertemuan tatap muka. Selain itu dapat juga digunakan buletin, poster papan pengumuman dan sebagainya.

1.2. Komunikasi ke atas

Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang berasal dari bawahan dan ditujukan pada atasan, biasanya bergerak menurut garis hierarki dalam organisasi. Fungsinya bagi atasan adalah untuk mengetahui kegiatan-kegiatan para bawahan, keputusan yang akan dibuat, dan bagaimana prestasi kerja bawahan (*performans*).

Bentuk-bentuk komunikasi keatas ini meliputi laporan pelaksanaan pekerjaan, saran-saran, rekomendasi, rencana anggaran, pendapat, keluhan, permintaan bantuan dan sebagainya. Sementara media yang dipakai adalah rapat-rapat, laporan tertulis, memo, telepon, pertemuan langsung

(tatap muka). Berdasarkan informasi bawahan tersebut pimpinan dapat melakukan klarifikasi informasi dari bawahan dengan melakukan survei, pertemuan khusus antara pimpinan dengan pekerja, panitia khusus, daftar pertanyaan, informan dan sebagainya.

1.3. Komunikasi lateral

Komunikasi lateral terjadi antara orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan yang setingkat dalam struktur organisasi (komunikasi horizontal) dan antara orang-orang yang menduduki jabatan yang berbeda tingkatannya tetapi tidak ada hubungan komando langsung (komunikasi diagonal). Komunikasi ini terjadi secara teratur diantara para pekerja yang bekerja sama sebagai satu tim, antara anggota dari kelompok kerja yang mempunyai tugas-tugas yang saling tergantung, antara tenaga staf, lini, dan sebagainya.

Pola komunikasi lateral ini bertautan erat dengan arus pekerjaan dalam organisasi. Media komunikasi yang dipakai adalah pertemuan tatap muka, telepon, memo, order kerja dan sebagainya.

Fungsi utama komunikasi lateral adalah untuk koordinasi dan pemecahan masalah. Komunikasi lateral lebih cepat dan efektif dibandingkan dengan komunikasi melalui

saluran hierarki karena komunikasi ini selalu langsung antara pejabat yang bersangkutan.

b) Kejelasan Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang apabila isi, waktu pelaksana maupun bagaimana melaksanakannya diinformasikan dengan jelas. Kekaburan dan besarnya kemungkinan penginterpretasian informasi oleh pekerja akan dapat menimbulkan permasalahan baru. Kasim (1993:75) menyebutkan bahwa efektivitas komunikasi suatu organisasi dapat diukur melalui derajat ketelitian dan relevansi informasi yang ditransmisikan, derajat efisiensi jaringan komunikasi yang dipakai dan derajat kepuasan anggota organisasi.

Sementara menurut Steer dalam Kasim, (1993 :75) disebutkan bahwa salah satu penyebab hambatan yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi keorganisasian adalah adanya distorsi terhadap pesan yang disalurkan dalam komunikasi. Distorsi ini disebabkan karena perbedaan kerangka berfikir pengirim dan atau penerima informasi, penggunaan bahasa yang tidak tepat, kesalahan menafsirkan pesan yang diterima, pemadatan informasi untuk memungkinkan transmisi, dan adanya jarak sosial dan hambatan status antara pengirim dan penerima. Sementara itu menurut Edwars, ada enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah

kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggung jawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

c) Konsistensi Komunikasi

Konsistensi komunikasi berkaitan dengan perintah-perintah pelaksanaan yang disampaikan oleh atasan atau pekerja lainnya. Kekonsistenan komunikasi berarti penyampaian substansi informasi yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

2) Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (1994:14) dalam Witaradya (2010:1) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Information, Material, Equipment, Facilities, Money, People*". Sementara Hodge (1996:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: "*Human resources, Material resources, Financial resources and Information resources*". Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: "*Human resources- can be classified in a variety of ways; labors, engineers, accountants, faculty, nurses, etc*". Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: "*Material resources-equipment, building, facilities, material, office, supplies, etc*". Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: "*Financial*

resources-cash on hand, debt financing, owner's investment, sale reveue, etc". Serta sumber daya informasi dibagi menjadi: "*Data resources-historical, projective, cost, revenue, manpower data etc*".

Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : "*Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies*". Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan, "*Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be provided and reasonable regulation will not be developed*".

"Sumber daya diposisikan sebagai *input* dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *output*. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi". Menurut Edward III dalam Agustino (2006) sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- a. Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya

- disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b. Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
 - c. Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya (hal.158-159).

Sumber daya merupakan kelengkapan untuk melaksanakan kebijakan mencakup 4 (empat) komponen yang penting, yaitu sumber daya staf yang cukup dalam arti jumlah dan mutu; informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan; kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas atau tanggung jawab; dan sarana dan prasarana berupa fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

a) Sumber Daya manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan. Menurut Nawawi (2000) ada 3 pengertian sumber daya manusia yaitu :

- 1) Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai atau karyawan).
- 2) Potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- 3) Potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/ non finansial) didalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan organisasi (hal. 10).

Menurut Sulistiyani dan Rosidah (2003: 9) Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang pegawai, sedangkan potensi non fisik adalah kemampuan seseorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensi, keahlian, keterampilan dan human relation. Kedua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia itu meliputi potensi yang ada pada diri seseorang pegawai baik fisik maupun non fisik. Dengan demikian pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan sangat tergantung kepada potensi/kemampuan atau kualitas serta kuantitas pegawai yang ada dalam organisasi.

b) Kewenangan

Menurut Maharani (2009:1) Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (*authority*) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Dengan demikian kewenangan berkaitan dengan hak atau kekuasaan untuk menjalankan kegiatan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Informasi

Salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi adalah terletak pada arus informasi yang dimiliki organisasi tersebut. Informasi sangat berpengaruh pada arah dan tujuan dari suatu organisasi. Informasi merupakan berita yang

diperoleh organisasi dan atau pekerja baik dari dalam maupun luar organisasi atau individu. Informasi juga berarti keterangan yang diperoleh baik secara lisan atau tulisan untuk mempermudah atau memperlancar kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu, informasi yang disampaikan atau yang diterima haruslah jelas.

d) Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam menunjang atau membantu para pekerja didalam pelaksanaan kegiatan operasional organisasi tersebut. Dengan kelengkapan sarana dan prasarana pada suatu organisasi, maka setiap kegiatan yang dijalankan oleh para pekerja akan lebih mudah dan cepat.

3) Sikap dan Perilaku Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan menurut George C. Edwards III (1980) dalam Mulyono (2009 : 3) kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para

pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada di dalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

Sikap adalah cara seseorang memandang sesuatu secara mental Atmosoepipto, (2002:11). Sikap ini juga berarti cara seseorang mengkomunikasikan perasaannya pada orang lain. Dengan kenyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kunci keberhasilan kegiatan atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162) "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik". Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1. Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2. Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

4) Struktur Birokrasi/Tata Aliran Kerja

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Struktur Birokrasi merupakan salah satu badan yang menjadi pelaksana kebijakan. Ada 2 (dua) indikator penting dalam birokrasi yaitu pertama, *standar operational procedure* (SOP) yang tidak menyulitkan aparat pelaksana dan dibuat secara sederhana namun tetap tidak mengurangi makna secara keseluruhan dan kedua fragmentasi organisasi yaitu penyebaran tanggung jawab pelaksana tugas sehingga tidak tumpah tindih (duplikasi) dengan tetap mencakup pada pembagian tugas secara menyeluruh.

Dalam implementasi kebijakan, struktur birokrasi erat kaitannya dengan struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan. Menurut

Winarno (2002: 151) struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan mempunyai pengaruh penting pada implementasi. Salah satu aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya SOP.

Memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi*".

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi". Pada umumnya, semakin besar

koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, semakin berkurang kemungkinan keberhasilan program atau kebijakan.

Sementara Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, peraturan-peraturan dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi. Fragmentasi birokrasi dapat menghambat koordinasi dalam birokrasi, padahal penyebaran wewenang dan sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kompleks membutuhkan koordinasi.

Sebagaimana telah dibahas dalam konsep implementasi kebijakan, terdapat berbagai variabel yang saling terkait, berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Keseluruhan variabel tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dan dapat menjadi faktor pendorong (*push faktor*) maupun faktor penghambat (*pull faktor*).

Pada tahap implementasi berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Adapun faktor yang mendukung atau pendorong adalah : (1) dukungan pimpinan, (2) komitmen para pelaksana (3) Kemampuan organisasi pelaksana (4) dukungan masyarakat atau kelompok sasaran. Sedang faktor penghambat dapat dikemukakan sebagai berikut ; (1) banyaknya pelaku yang terlibat, (2) terdapatnya loyalitas ganda, (3) kemitraan program, (4) jenjang pengambilan keputusan.

Menurut Warwick dalam Aries (2009:24), pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek yaitu :

(1) Faktor pendorong (*facilitating conditions*)

(2) Faktor penghambat (*impeding conditions*)

Faktor Pendorong

- a. Komitmen Pimpinan Politik : dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.
- b. Kemampuan Organisasi : dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
- c. Komitmen Para Pelaksana (Implementers) : salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

Faktor Penghambat

- a. Banyaknya 'Pemain' (*actors*) yang terlibat
Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, makin rumit komunikasi makin besar kemungkinan terjadinya 'delay' hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda

Dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain.

c. Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri

Dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.

d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak

Makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

e. Faktor Lain : waktu dan perubahan kepemimpinan

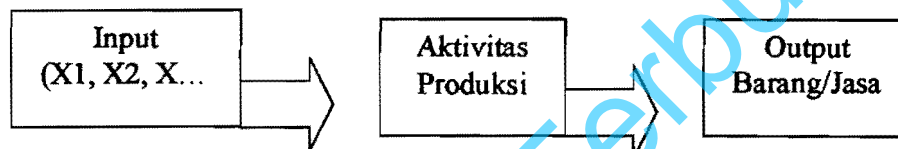
Makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan.

4. Teori Produksi

Pada setiap kegiatan produksi seseorang terlebih dahulu harus membuat keputusan mengenai apa yang akan diproduksi, bagaimana cara

memproduksinya dan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi tersebut. Sudarman (1989 : 67) menyatakan hubungan antara jumlah barang yang dihasilkan (output) dalam suatu kegiatan produksi dengan faktor-faktor produksi yang digunakan (input) disebut dengan fungsi produksi.

Menurut Nur Cahyo (2001:2) Skema proses produksi dapat digambarkan sebagai berikut :



Produksi merupakan konsep arus (*flow concept*), bahwa kegiatan produksi diukur dari jumlah barang-barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu, sedangkan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak berubah.

Kemudian Murtiasih (2009 : 1) mengemukakan fungsi produksi merupakan hubungan antara faktor-faktor produksi (tenaga kerja, tanah, modal dan keahlian keusahawanan) dan tingkat produksi yang diciptakan

Selanjutnya Massofa (2008: 3) mengemukakan teori produksi pada sektor pertanian dengan Satu Variabel Input. Dalam suatu proses produksi digunakan berbagai jenis input yang dapat dibedakan atas input variabel dan input tetap. Input variabel adalah input yang tingkat penggunaannya berpengaruh secara langsung terhadap produksi. Sedangkan, input tetap adalah input yang penggunaannya tidak langsung berpengaruh terhadap

produksi dalam jangka pendek. Konsep dari fungsi produksi didefinisikan sebagai skedul atau persamaan matematika yang menunjukkan kuantitas maksimum output yang dapat dihasilkan dari serangkaian input.

Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas maka dalam pengertiannya yang paling umum bahwa produksi jeruk di Desa Lambodi Jaya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, antara lain : luas lahan, bibit, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, teknologi.

B. Kebijakan Pengembangan Perkebunan dan Hortikultura

Pembangunan pertanian termasuk sub sektor hortikultura, akan tetap mempunyai peran yang strategis terutama dalam menyediakan pangan khususnya buah, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat yang cukup tinggi bagi seluruh penduduk serta memberdayakan ekonomi rakyat di pedesaan.

Tanaman hortikultura merupakan salah satu kelompok komoditas yang mampu memberikan pertumbuhan tinggi dalam perekonomian, dapat meningkatkan pendapatan petani, meskipun dalam luasan dan jumlah yang relatif tidak begitu besar, namun dapat dijadikan sumber pendapatan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap pengembangan hortikultura menjadi prioritas khususnya pada komoditi unggulan yang dikembangkan melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM)/Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK).

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah cq. Departemen pertanian untuk meringankan beban biaya usaha pertanian kepada Kelompok Sasaran (*Target Groups*) yang melakukan kegiatan usaha pertanian di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Tujuan dari pemberian BLM adalah :

- a. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi di sektor pertanian yang kondusif, khususnya usaha pertanian skala kecil
- b. Secara bertahap memberikan pembinaan kepada Kelompok Sasaran agar mampu menjadi pelaku usaha agribisnis yang mandiri
- c. Mengurangi resiko usaha mikro-kecil melalui keringanan biaya usaha
- d. Meningkatkan daya saing dan produktivitas pertanian skala mikro-kecil

Pemerintah melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005 telah mengalokasikan dana melalui Program Pengembangan Agribisnis dengan kegiatan pengembangan jeruk siam di Kabupaten Konawe Selatan dengan pola bantuan langsung masyarakat kepada 4 (empat) kelompok dengan nilai Rp. 180.000.000,- 2 (dua) kelompok diantaranya berada di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan yang mejadi lokasi penelitian ini. Masing-masing kelompok sasaran menerima dana BPLM senilai Rp. 45.000.000 akan digunakan sebagai penguatan modal usaha kelompok dengan merujuk pada Rencana Usaha Kelompok yang telah disusun dengan bimbingan petugas.

Tabel 2.1
Penerima BPLM Satker Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005

Kabupaten : Konawe Selatan

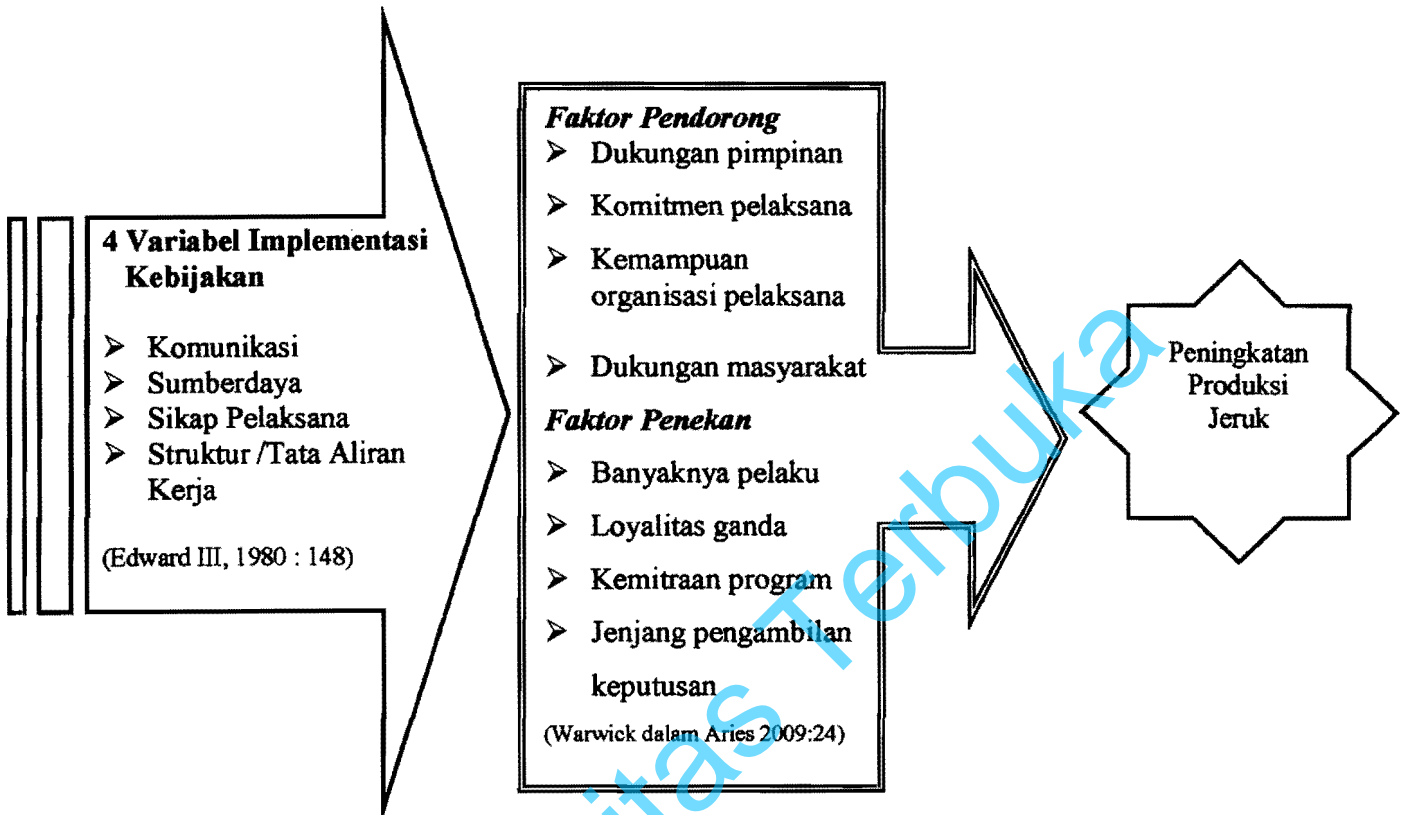
No	Nama/Alamat	Jabatan	Rekening Kelompok	Jumlah (Rp)
1	Imam Musoli Desa Lambodi Jaya	Ketua Kelp. Tani Harapan Jaya	BRI Unit Tinanggea	45.000.000,-
2	Choiru Najib Desa Lambodi Jaya	Ketua Kelp. Tani Mekar Sari	BRI Unit Tinanggea	45.000.000,-
	Jumlah			90.000.000

Sumber : Laporan Tahunan Satker Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura 2005

C. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan maka kerangka pemikiran atau kerangka analisis yang digunakan adalah masalah implementasi sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Menurut Edward III (1980:9), bahwa ada empat variabel yang merupakan prasyarat harus dipenuhi untuk berhasilnya implementasi suatu kebijakan atau program, yaitu; komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan tata aliran kerja. Namun demikian, implementasi kebijaksanaan atau program senantiasa dipengaruhi oleh kekuatan yang dapat mendorong dan menghambat. Kerangka analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

KERANGKA PIKIR PENELITIAN



D. Definisi Operasional

1. Kebijakan pengembangan jeruk siem

Pengembangan tanaman jeruk siem diarahkan pada upaya mewujudkan usaha tani yang efisien dan efektif, sehingga tercipta peningkatan pendapatan petani dan hasil jeruk siem yang berdaya saing, melalui kegiatan peningkatan produktivitas dan mutu jeruk. Kebijakan ini diimplementasikan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melalui program pengembangan agribisnis dengan sasaran : Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura yang berwawasan agribisnis melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM/BPLM/PUMK). Dana BLM tersebut ditransfer ke kelompok tani yang menjadi sasaran melalui rekening kelompok dan akan digunakan sebagai dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK) yang menjadi sasaran pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lelembuu Kabupaten Konawe Selatan

- ##### **2. Implementasi sebagai suatu proses pelaksanaan administrasi dalam arti luas yang dapat dipahami pada tingkat yang lebih khusus dari suatu program. Dengan demikian implementasi merupakan pergerakan kebijaksanaan dalam arti administrasi dan politik untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa ada empat variabel yang merupakan prasyarat bagi keberhasilan proses implementasi yaitu :**

- a. Komunikasi, menyangkut penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi dalam pelaksanaan tugas pengimplementasian kebijakan pengembangan jeruk.
- b. Sumberdaya, yaitu mencakup sumberdaya manusia, kewenangan, informasi serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c. Sikap pelaksana, menyangkut komitmen dan sikap pelaksana terhadap kebijakan menjadi ukuran berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan pengembangan jeruk.
- d. Struktur/Tata aliran kerja, guna mendukung efektifitas dalam pelaksanaan pengembangan jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan diperlukan penyusunan Standar Prosedur Operasional (SPO).
- e. Pengembangan jeruk di Sulawesi Tenggara dilakukan dengan sistem pewilayahan komoditi sentra produksi yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian agroklimat dan kondisi wilayah. Permasalahan utama dalam pengembangan jeruk siem yaitu berkaitan dengan mutu buah yang dihasilkan petani tergolong rendah dengan indikator rendahnya mutu buah jeruk : tekstur buah : kotor, keseragaman buah, serta warna kulit buah ada yang kusam dan tidak mengkilat; rasa : manis, kurang manis, sedikit asam dan aroma yang sangat tajam.

Kualitas produksi merupakan faktor utama dalam merebut pasar karena itu untuk mendapatkan mutu produk yang benar-benar prima, dalam pengembangan jeruk telah difasilitasi penyusunan Standar Teknis Operasional atau Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan melibatkan *stakeholder* yang memuat kaidah-kaidah budidaya tanaman yang baik dan benar meliputi : penanaman, pemangkasan, pemeliharaan, sanitasi kebun, pemupukan, penjarangan buah, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), panen dan penanganan pasca panen yang disesuaikan dengan kondisi setempat agar menjadi pedoman dalam pengelolaan kebun jeruk dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, mutu produksi yang dihasilkan semakin baik dan memenuhi standar dengan harapan dapat memberikan keuntungan maksimal yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Pada tahap implementasi berbagai kekuatan akan berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor yang menghambat. Adapun faktor yang mendukung atau pendorong adalah : (1) dukungan pimpinan, (2) komitmen para pelaksana, (3) kemampuan organisasi pelaksana, (4) dukungan masyarakat atau kelompok sasaran. Sedang faktor penekan/penghambat dapat dikemukakan sebagai berikut : (1) banyaknya pelaku yang terlibat, (2) terdapatnya loyalitas ganda, (3) kemitraan program, (4) jenjang pengambilan keputusan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didasarkan atas pendekatan penelitian deskriptif kualitatif Harafah (2008:202) mengemukakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk mendeskripsikan/menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Sejalan dengan maksud penelitian ini untuk mendiskripsikan masalah-masalah implementasi kebijaksanaan pengembangan jeruk siem, sehingga hasil penelitian dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah petani jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu yaitu sebanyak 45 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah petani peserta pengembangan jeruk siem dengan pola Bantuan Langsung Masyarakat sebanyak 45 orang yang diambil dengan menggunakan teknik total sampling yang didasarkan pada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk mengungkap data dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data tersebut digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Data Primer diperoleh dengan cara :

- a) Kuesioner, digunakan untuk memperoleh informasi tentang realisasi pelaksanaan program pengembangan tanam jeruk siem. Kuesioner dibagikan kepada responden dengan memberikan penjelasan awal mengenai tujuan pengisian daftar pertanyaan oleh tim yang sengaja dibentuk untuk pengambilan data.
- b) Wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang berbagai langkah manajerial dan operasional yang dilakukan kearah peningkatan kemampuan dan keterampilan petani jeruk siem. Informan kunci diambil dari petugas lapangan/penyuluh pertanian 1 (satu) orang, Kepala Desa Lambodi Jaya 1 (satu) orang, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan 1 (satu) orang, jumlah 3 (tiga) orang.
- c) Analisis dokumentasi, dilakukan pada data sekunder berupa laporan petugas lapangan mencakup: laporan bulanan, triwulan dan tahunan.

Data Sekunder lainnya diperoleh dari studi literatur dan publikasi lainnya oleh lembaga dan instansi yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Analisa Data

Harafah (2008:102) Analisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan secara konsepsional terhadap makna dan istilah yang dipergunakan dalam pernyataan yang dibuat guna memperoleh makna dan menguji istilah-istilah. Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah melalui prosedur sebagai berikut :

- a. *Coding* adalah memberi kode nomor jawaban yang diisi oleh responden yang ada dalam daftar pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses tabulasi data/*entry data*.
- b. *Editing* yaitu memeriksa adanya kesalahan atau kurang lengkapnya data yang diisi oleh responden.
- c. Data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisa secara deskriptif dengan persentase dan menggunakan landasan teori yang ada untuk menggambarkan tingkat implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam peningkatan produksi jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Secara kualitatif analisis akan diperdalam melalui interpretasi data yang disajikan melalui tabel dan dihubungkan dengan hasil wawancara terhadap sejumlah informan.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Lalembuu

Kecamatan Lalembuu merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Tinanggea dan resmi menjadi kecamatan Lalembuu sejak tanggal 28 Mei 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan nomor 6 Tahun 2006 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kecamatan Andoolo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Taman Nasional Rawa Aopa
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Kecamatan Basala
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tinanggea

Jumlah penduduk di kecamatan lalembuu menurut jenis kelamin :

- Penduduk laki-laki : 8.818 jiwa
- Penduduk perempuan : 8.936 jiwa

Dengan struktur ekonomi :

- Petani : 10.720 orang
- Nelayan ; -
- PNS : 89 orang
- Lain-Lain : 100 orang

Tabel 4.1

Jumlah desa di kecamatan Lalembuu menurut status tahun 2009

No	Nama Desa	Status Desa
1.	Potuhoy Jaya	Definitif
2.	Lambodi Jaya	Definitif
3.	Atari Jaya	Definitif
4.	Atari Indah	Definitif
5.	Mekar Jaya	Definitif
6.	Lalembuu Jaya	Definitif
7.	Tombeleu	Persiapan
8.	Lambandia	Definitif
9.	Sumber Jaya	Definitif
10.	Mandoke	Definitif
11.	Padaleu	Persiapan
12.	Meronga Raya	Definitif
13.	Punangga	Definitif
14.	Teteinea	Definitif
15.	Purema Subur	Definitif
16.	Suka Mukti	Definitif
17.	Moreu	Persiapan
18.	Kapuwila	Definitif
19.	Laloue	Persiapan

Sumber : Kantor Camat Lalembuu, 2009

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan bahwa dari sembilan belas desa di kecamatan Lalembuu terdapat lima belas desa atau 78,9 persen adalah desa definitif dan terdapat empat desa atau 21 persen adalah desa persiapan.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat serta dalam upaya memperlancar proses pembangunan di tingkat desa, pemerintah daerah kabupaten konawe selatan membentuk desa persiapan yang baru, dan meningkatkan status desa persiapan yang lama menjadi desa-desa definitif.

Perubahan status desa menjadi definitif dimaksudkan agar desa tersebut lebih maju dalam membangun bersama-sama warga.

Tabel 4.2
Penggunaan Lahan di Kecamatan Lalembuu tahun 2009

No	Lahan	Luas (Ha)
1.	Sawah	1.238
2.	Perkebunan dan Hortikultura	
	- Kakao	4.160
	- Jambu Mete	1.060
	- Kelapa Dalam	100
	- Kelapa Hybrida	556,5
	- Lada	61
	- Kopi	21
	- Kemiri	2
	- Sagu	1
	- Panili	31
	- Mangga	5
	- Jeruk	2.100

Sumber : Kantor Camat Lalembuu, 2009

B. Implementasi Program Pengembangan Jeruk Siem

Keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem dipengaruhi oleh faktor-faktor : komunikasi, sumberdaya manusia, disposisi atau sikap pelaksana, struktur/tata aliran kerja yang ada. Untuk lebih jelasnya disajikan pada uraian berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi sebuah program. Apabila komunikasi tidak berjalan dengan baik antara pelaksana program dengan penerima program, maka program tersebut tidak mendapat tanggapan positif dan dukungan dari pihak yang menerima program, akibatnya program tersebut menjadi gagal, tidak berhasil dan bahkan terhenti sama sekali.

Dalam implementasi suatu program, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi program terhadap penerima program sebagai pihak yang akan menerima program tersebut, dengan maksud untuk menyampaikan tentang keberadaan program, siapa pelaksananya dan apa tujuannya.

Berdasarkan hasil kajian lapangan diketahui bahwa sebelum program disosialisasikan kepada petani, dengan tujuan agar petani mengetahui akan adanya program pemerintah tersebut dengan berbagai jenis kegiatannya yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3

Tanggapan responden terhadap sosialisasi program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pernah	45	100
2	Tidak Pernah	-	
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Berdasarkan tabel 4.3 di atas nampak bahwa 100 % responden menyatakan sosialisasi program pengembangan jeruk siem pernah dilaksanakan, sehingga dalam implementasinya program ini diketahui oleh petani.

Dari penelitian yang dilaksanakan diketahui bahwa keberhasilan sosialisasi program pengembangan jeruk siem adalah karena minat masyarakat cukup baik, melalui pertemuan yang diprakarsai oleh kepala desa setempat dimana aparat pelaksana mengemukakan tujuan-tujuan program dan masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya agar dapat memahami dengan baik tujuan dan maksud program dilaksanakan. Komunikasi yang berjalan dengan baik menyebabkan kegiatan sosialisasi program pengembangan jeruk siem berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan model implementasi George C. Edward III dalam Winarno (2002:126) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu persyaratan bagi implementasi kebijakan yang efektif.

Melalui komunikasi yang baik hubungan dan interaksi antara petani dengan aparat pelaksana dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan dan sasaran program dapat dicapai, seperti integrasi antara petani jeruk dan aparat dapat berlangsung secara terus menerus dalam rangka mensosialisasikan program pengembangan jeruk siem.

Adapun interaksi antara petani dengan aparat pelaksana dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Intensitas interaksi antara petani dengan aparat dalam implementasi
program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sering	37	82,22
2	Kadang-Kadang	5	11,11
3	Tidak Pernah	3	6,67
Jumlah		45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 82,22 persen responden menyatakan interaksi antara petani dan aparat pelaksana sering dilakukan, terdapat 11,11 persen responden yang menyatakan kadang-kadang dan hanya 6,67 persen responden menyatakan tidak pernah dilakukan interaksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi antara petani dengan aparat pelaksana mengenai program, maksud dan tujuan serta bagaimana implementasi dan pelaksanaannya di lapangan berjalan baik, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Wursanto (2001:155) bahwa dalam berkomunikasi dibangun suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain untuk mendapatkan saling pengertian.

Berjalan baiknya komunikasi antara petani dan aparat pelaksana ditunjukkan dengan adanya penerimaan petani terhadap program yang dilaksanakan, dimana rata-rata petani menyatakan menerima dengan baik program pengembangan jeruk siem, untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Pernyataan responden mengenai sering tidaknya mereka melakukan komunikasi dengan aparat pemerintah desa atau kelurahan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sering	38	84,44
2	Kadang-kadang	4	8,88
3	Tidak Pernah	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, 84,44 persen responden yang menyatakan cukup sering melakukan komunikasi, 8,86 persen menyatakan kadang-kadang melakukan komunikasi, dan 6,67 persen menyatakan tidak pernah melakukan komunikasi.

Responden yang menyatakan sering, umumnya adalah pengurus kelompok tani yang dipercayakan oleh anggotanya untuk mengurus kepentingan mereka sehubungan dengan pelaksanaan program. Sedangkan responden yang menyatakan tidak pernah adalah mereka yang telah menyerahkan sepenuhnya urusan mereka dengan ketua kelompoknya untuk mengurus hak-hak dan kebutuhannya dengan pelaksana program tersebut.

Dari wawancara tersebut diketahui, bahwa aparat desa/kelurahan pada dasarnya sangat dibutuhkan perannya untuk mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem di desa lambodi jaya. Untuk itu, semua kebutuhan petani, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dikomunikasikan dengan petani agar kegiatan yang dilakukan benar-benar terarah dan sesuai dengan mekanisme program pengembangan jeruk siem.

Pelaksanaan implementasi program pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya juga perlu dilihat dari sisi petaninya, apakah petani mengerti dan memahami program pengembangan jeruk siem tersebut. Tabel berikut menjelaskan pernyataan responden tentang pemahaman mereka tentang program pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.6
Pernyataan responden mengenai pemahaman mereka tentang program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mengerti	32	71,11
2	Kurang Mengerti	11	24,44
3	Tidak Mengerti	2	4,44
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 71,11 persen responden yang menyatakan mengerti, dan 24,44 persen responden menyatakan kurang mengerti, dan hanya 4,44 persen responden menyatakan yang menyatakan tidak mengerti.

Responden yang menyatakan mengerti, umumnya adalah ketua kelompok, pengurus kelompok dan anggota-anggota kelompok tani yang aktif sejak awal. Responden yang menyatakan kurang mengerti adalah anggota kelompok tani yang pasif dalam mengikuti pertemuan-pertemuan sosialisasi program pengembangan jeruk siem dan yang tidak mengerti adalah

petani yang mewakilkan kehadirannya pada pertemuan-pertemuan kelompok.

Keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem juga dipengaruhi oleh komunikasi yang dibangun antara aparat pelaksana dengan petani sehingga petani dapat menerima program tersebut, tabel berikut menjelaskan pernyataan responden mengenai penerimaan mereka terhadap Program Pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

Tabel 4.7
Pernyataan responden berdasarkan penerimaan mereka terhadap program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Diterima	36	80,00
2	Kurang diterima	6	13,33
3	Tidak diterima	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 80,00 persen menyatakan menerima program pengembangan jeruk siem, 13,33 persen menyatakan cukup menerima dan terdapat 6,67 persen menyatakan tidak menerima.

Responden yang menyatakan menerima adalah mereka yang telah menyadari pentingnya implementasi program pengembangan jeruk siem untuk meningkatkan pendapatan petani, sedangkan responden yang menyatakan kurang menerima adalah mereka yang mempersiapkan lahannya untuk

program lain dan belum pernah mencoba mengembangkan tanaman jeruk siem.

Selama implementasi program, juga dilakukan penyuluhan dari aparat pelaksana atau instansi teknis terkait yang dimaksudkan untuk menyampaikan berbagai kegiatan program yang terkait dengan pengembangan jeruk siem dan juga menyangkut hak-hak dan kebutuhan petani yang akan diberikan secara langsung kepada petani agar dapat menunjang kegiatannya seperti pupuk dan bibit.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diperoleh data bahwa pelaksanaan penyuluhan tergolong cukup dilakukan oleh pihak aparat kepada petani. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8

Pernyataan responden mengenai pelaksanaan penyuluhan oleh aparat pelaksana implementasi program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dilakukan	32	71,11
2	Kurang dilakukan	8	17,77
3	Tidak dilakukan	5	11,11
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 71,11 persen responden menyatakan dilakukan penyuluhan, 17,77 persen menyatakan kurang dilakukan penyuluhan dan terdapat 11,11 persen menyatakan tidak dilakukan penyuluhan.

Responden yang menyatakan cukup dilakukan penyuluhan karena aparat telah melakukan penyuluhan di daerahnya sesuai program yang telah ditetapkan, sedangkan responden yang menjawab kurang dilakukan karena penyuluhan di daerahnya belum sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan responden yang menyatakan tidak pernah dilakukan penyuluhan adalah responden yang diwakili kehadirannya dalam pertemuan. Jawaban responden di atas menggambarkan selalu dilakukan penyuluhan oleh aparat atau pelaksana implementasi program dengan menyampaikan langsung ke petani tentang berbagai hal yang menyangkut kegiatan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem termasuk pemenuhan kebutuhan yang akan ditanggung pemerintah.

Dari pengamatan diketahui bahwa meskipun intensitasnya tidak terlalu sering, namun pelaksanaan penyuluhan sudah dilakukan sesuai dengan jadwal karena dalam penyuluhan aparat mempertimbangkan kemajuan yang dicapai petani dalam implementasi program pengembangan jeruk siem, jika dalam satu lokasi kemajuan yang dicapai maka intensitas penyuluhan ditingkatkan, karena kondisi tersebut menunjukkan petani belum memahami sepenuhnya tujuan dan mekanisme program.

2. Sumber Daya

Selain komunikasi, sumberdaya juga berperan penting bagi keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem. Sumber daya dimaksud adalah kemampuan petugas lapangan atau pihak pengelola

program dalam mengimplementasikan kegiatan yang terkait langsung dengan program pengembangan jeruk siem

Berdasarkan hasil kajian lapangan diperoleh data bahwa petugas lapangan yang terlibat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem cukup memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mampu	35	77,77
2	Kurang mampu	7	15,55
3	Tidak mampu	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 73,33 persen responden menyatakan petugas lapangan mampu dalam melaksanakan tugasnya dan hanya 6,67 persen yang menyatakan tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya. Responden yang menyatakan mampu karena menganggap implementasi program pengembangan jeruk siem sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh petugas lapangan dan aparat pelaksana, sedangkan responden yang menyatakan tidak mampu karena melihat belum ada kemajuan berarti yang dapat dicapai didaerahnya dengan adanya implementasi program pengembangan jeruk siem.

Dalam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa petugas lapangan dan yang terlibat cukup mampu melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari keberhasilan memberdayakan petani dan implementasi program pengembangan jeruk siem yang sudah berlangsung dengan baik meskipun dalam sejumlah hal masih perlu lebih dioptimalkan, karena masih terdapat sejumlah petani yang mengimplementasikan program tersebut belum berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi jeruk siem.

Keberhasilan yang dicapai menunjukkan bahwa petugas lapangan yang terlibat mampu mengimplementasikan seluruh program yang ada, meskipun pencapaian hasilnya masih perlu dioptimalkan lagi.

Kemampuan petugas lapangan yang terlibat dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik menurut responden terlihat pula dari kemampuannya mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun. Hal ini penting diperhatikan karena salah satu kriteria keberhasilan dan kemampuan dari petugas lapangan dan aparat adalah apabila seluruh rencana-rencana implementasi program pengembangan jeruk siem berhasil dilaksanakan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen sumberdaya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Tanggapan responden mengenai kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dan merealisasikan rencana-rencana program dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Pernyataan responden mengenai kemampuan sumber daya
petugas

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mampu	34	75,26
2	Kurang mampu	7	15,55
3	Tidak mampu	4	8,88
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 75,26 persen responden menyatakan petugas lapangan dan aparat mampu melakukan sosialisasi dan implementasi rencana-rencana yang disusun, terdapat 15,55 persen yang menyatakan petugas lapangan dan aparat yang kurang mampu mensosialisasikan dan mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah disusun dalam program tersebut dan hanya 8,88 persen responden yang menyatakan tidak petugas tidak mampu. Responden yang menyatakan petugas dan aparat yang mampu karena rencana-rencana yang sudah disusun dalam implementasi program pengembangan jeruk siem sudah dapat direalisasikan dengan baik.

Responden yang menyatakan kurang mampu karena belum semua rencana-rencana yang sudah disusun dalam mengimplementasikan program dapat direalisasikan khususnya rencana peningkatan produksi jeruk siem dan peningkatan kualitas produksi jeruk siem.

Dalam hal memberdayakan petani melalui implementasi pengembangan jeruk siem, berdasarkan hasil kajian lapangan diperoleh data bahwa sumberdaya yang terlibat cukup mampu melakukan pemberdayaan pada petani dan masyarakat lokal. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas lapangan dan aparat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mampu	25	55,56
2	Kurang mampu	17	37,78
3	Tidak mampu	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa masing-masing 55,56 persen responden yang menyatakan mampu dalam memberdayakan petani dan masyarakat lokal dan 37,78 responden menyatakan kurang mampu dalam memberdayakan petani dan masyarakat lokal dan terdapat 6,67 persen responden yang menyatakan petugas tidak mampu dalam memberdayakan petani dan masyarakat lokal. Responden yang menyatakan mampu petugas dalam memberdayakan petani dan masyarakat lokal karena sebagian besar petani mampu memperoleh produksi jeruk siem sesuai yang diharapkan sesuai implementasi program pengembangan jeruk siem yang sudah diintegrasikan dengan baik. Sedangkan responden yang memberi jawaban kurang mampu karena mereka

belum bisa mewujudkan peningkatan produksi dan kualitas jeruk siem seperti yang diharapkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam implementasi program cukup mampu melaksanakan pemberdayaan pada petani sehingga mempengaruhi struktur pendapatannya.

Dari pengamatan diketahui bahwa kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam memberdayakan petani dapat dilihat sejumlah faktor seperti :

1. Upaya peningkatan pendapatan sudah menunjukkan hasil yang diharapkan, karena dengan adanya petani yang berhasil meningkatkan produksinya, maka dapat menjadi contoh dan motivasi yang baik bagi petani lainnya untuk benar-benar mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem.
2. Dengan adanya implementasi program pengembangan jeruk siem, petani dapat menggalang kerjasama dan munculnya kesadaran yang tinggi untuk membangun didaerahnya sehingga memberi kontribusi terhadap kemajuan pembangunan di daerah dan peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi jeruk siem.

Adanya kedua hal tersebut di atas mengindikasikan bahwa kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam memberdayakan petani dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem sudah berjalan dengan baik meskipun harus lebih dioptimalkan.

Kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam memberdayakan petani dalam implementasi program pengembangan jeruk siem terlihat pula pada kemampuan mereka mewujudkan sikap kebersamaan antara petani, sehingga diantara petani terjalin hubungan sosial yang sinergik dan harmonis satu sama lainnya untuk mendukung keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem tersebut.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan diperoleh data bahwa umumnya responden menyatakan sumberdaya petugas lapangan dan aparat yang terlibat mampu mewujudkan sikap kebersamaan antara petani guna bersama-sama meningkatkan produksi jeruk siem melalui implementasi program pengembangan jeruk siem. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12

Pernyataan responden mengenai kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam mewujudkan sikap kebersamaan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mampu	35	77,78
2	Kurang mampu	8	17,77
3	Tidak mampu	2	4,44
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 77,78 persen responden menyatakan sumberdaya petugas dan aparat mampu mewujudkan sikap kebersamaan antara petani dalam mengimplementasikan program

pengembangan jeruk siem, terdapat 17,77 persen yang menyatakan kurang mampu dan hanya 4,44 persen yang menyatakan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam mewujudkan sikap kebersamaan antara petani dalam implementasi program pengembangan jeruk siem. Responden yang menyatakan mampu karena merasa telah terjalin kerjasama yang baik antar petani, sedangkan responden yang menganggap kurang mampu karena menganggap kerjasama petani belum benar-benar dapat diwujudkan dengan baik sesuai tujuan sehingga kendala-kendala atau hambatan yang dijumpai dalam implementasi program pengembangan jeruk siem belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan petugas lapangan dan aparat yang terlibat tersebut cukup mampu dalam mewujudkan sikap kebersamaan antara petani. Sehingga diantara petani selalu terjalin hubungan harmonis dalam segala aktivitas yang dilaksanakan khususnya mengantisipasi kendala dan hambatan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Edward III, dalam Agustino (2006:158-159) bahwa sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik, sejauhmana sumber daya yang dimiliki (staf, informasi, kewenangan dan fasilitas) mempengaruhi implementasi kebijakan.

3. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor yang tak kalah penting dalam menentukan keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem,

sebab ada tidaknya dukungan dari pihak sasaran program untuk mensukseskan pelaksanaan program sangat tergantung dari sikap pelaksana.

Hasil kajian diperoleh data bahwa sikap pelaksana selama pelaksanaan implementasi program pengembangan jeruk siem secara umum cukup baik.

Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Pernyataan responden mengenai sikap pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	34	75,56
2	Kurang baik	8	17,77
3	Tidak baik	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 75,56 persen responden yang menyatakan sikap pelaksana baik dalam implementasi program pengembangan jeruk siem, terdapat 17,77 persen yang menyatakan kurang baik dan 6,67 persen menyatakan sikap pelaksana tidak baik dalam implementasi program pengembangan jeruk siem. Responden yang menyatakan bahwa sikap pelaksana cukup baik karena pelaksana telah memberikan pelayanan kepada masyarakat petani untuk memenuhi kebutuhannya dengan tepat waktu terhadap kegiatan implementasi pengembangan jeruk siem, sedangkan responden yang menyatakan kurang baik karena pelayanan yang diberikan oleh aparat pelaksana masih kurang

mampu memenuhi kebutuhan petani dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap pelaksana selama ini cukup baik dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa sikap pelaksana dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem relatif sudah baik, karena sudah mampu berfungsi melayani kepentingan-kepentingan petani dalam hal kebutuhan peningkatan produksi jeruk seperti memberi pengarahan dalam menggarap tanah, memberi bimbingan dalam mensosialisasikan aturan-aturan dan membantu petani dalam menghadapi perubahan kondisi produksi, pemasaran dan pendapatannya.

Sikap pelaksana yang sudah relatif baik dapat terlihat dari ramah tidaknya mereka dalam memberikan pelayanan kepada petani dalam mengarahkan, membimbing dan melaksanakan penyuluhan sehingga program pengembangan jeruk siem dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil kajian lapangan diperoleh bahwa umumnya responden menyatakan bahwa pelaksana (petugas lapangan dan aparat) cukup ramah dalam memberikan pelayanan kepada petani. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Pernyataan responden mengenai sikap ramah pelaksana dalam memberikan pelayanan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ramah	29	64,44
2	Kurang ramah	11	24,44
3	Tidak ramah	5	11,11
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 64,44 persen responden menyatakan sikap pelaksana ramah dalam memberikan pelayanan kepada petani, dan masing-masing 11,11 persen yang menyatakan kurang ramah dan 24,44 persen responden yang menyatakan tidak ramah.

Responden yang menyatakan pelaksana ramah karena telah memberikan pelayanan kepada petani dengan baik dan sabar sehingga petani merasa nyaman dalam menerima pelayanan, sedangkan responden yang menyatakan kurang ramah karena dalam pelayanan yang diberikan belum semua petugas lapangan dan aparat yang terlibat mampu bertindak sebagai pelayan yang baik dengan berupaya memenuhi semua kebutuhan dari masyarakat petani baik informasi maupun peralatan sehubungan dengan implementasi program pengembangan jeruk siem.

Secara umum keadaan tersebut menggambarkan bahwa sikap pelaksana cukup ramah dalam memberikan pelayanan kepada petani agar

berhasil meningkatkan produksi jeruk siem melalui implementasi program pengembangan jeruk siem.

Sikap ramah pelaksana telah mendukung pula kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan para petani dalam pelaksanaan program pengembangan jeruk siem. Selain itu dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan para pelaksana juga menunjukkan sikap yang cukup baik sehingga terjalin hubungan sosial kerjasama yang baik antara petani sebagai penerima program dan pelaksana sebagai fasilitator.

Berdasarkan hasil kajian lapangan diperoleh data bahwa pada umumnya responden menyatakan sikap pelaksana dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan cukup baik. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15

Pernyataan responden mengenai sikap pelaksana dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	29	64,44
2	Kurang baik	11	24,44
3	Tidak baik	5	11,11
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 64,44 persen responden yang menyatakan sikap pelaksana dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan baik, dan hanya 24,44 persen yang menyatakan kurang baik. Responden

yang memberi jawaban cukup baik karena dalam pemberian penyuluhan aparat sudah mampu menyampaikan semua program dan rencana-rencana program yang akan diimplementasikan dengan jelas dan terperinci, sedangkan responden yang menyatakan kurang mampu karena dalam pemberian penyuluhan aparat tidak dapat menyampaikan dengan baik dan transparan semua program dan rencana-rencana yang sudah ada disusun sehingga sebagian masyarakat maupun petani kurang memahaminya.

Sikap pelaksana yang cukup baik telah pula memberi ketenangan kepada para petani dalam menjalankan seluruh tahapan program, selain itu ditambah pula dengan adanya sikap transparan dari pelaksana dalam menjalankan seluruh program pengembangan jeruk siam telah menciptakan pula terjadinya sikap saling percaya antara petani dengan pelaksana, sehingga program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Edward III dalam Winanmo (2005:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Berdasarkan hasil kajian lapangan pada umumnya responden menyatakan pelaksana cukup transparan dalam menjalankan program pengembangan jeruk siam. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Pernyataan responden mengenai sikap transparansi pelaksana dalam menjalankan program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Transpsran	32	71,11
2	Kurang transparan	7	15,56
3	Tidak transparan	6	13,33
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 71,11 persen responden yang menyatakan sikap pelaksana transparan dalam melaksanakan seluruh program pengembangan jeruk siem, 15,56 persen responden menyatakan kurang transparan dan terdapat 13,33 persen yang menyatakan tidak transparan. Responden yang menganggap transparan karena aparat pelaksana telah menyampaikan dengan baik semua program khususnya pemberian bantuan kepada petani yang layak mendapat bantuan sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara petani dengan petugas lapangan dan aparat yang bertugas. Responden yang menyatakan tidak transparan adalah mereka yang menginginkan agar pelaksanaan program dapat dipercayakan sepenuhnya kepada petani, petugas lapangan dan aparat yang bertugas. Bagi responden yang menyatakan tidak transparan adalah mereka yang menginginkan agar pelaksanaan program dapat dipercayakan sepenuhnya kepada petani, petugas lapangan dan aparat pelaksana program yang bertugas tinggal menyiapkan bahannya dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan karena menurut

mereka bagaimanapun mereka lebih memahami kondisi daerah dan wilayahnya.

4. Struktur /Tata Aliran Kerja

Dalam kenyataan adanya struktur atau tata aliran kerja yang belum jelas dapat mengganggu jalannya implementasi program.

Berdasarkan hasil kajian diperoleh data bahwa para petani cukup mudah untuk mengurus kebutuhan mereka selama mengikuti program tersebut. Dalam arti mereka mendapatkan berbagai kemudahan tanpa adanya hambatan-hambatan dalam pengurusannya, walaupun ada hambatan itu hanya bersifat teknis saja. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Pernyataan responden mengenai kemudahan dalam mengurus kebutuhan program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	32	71,11
2	Kurang mudah	7	15,55
3	Tidak mudah	6	13,33
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 71,11 persen responden menyatakan mudah dalam pengurusan selama mengikuti program pengembangan jeruk siem, 15,55 persen menyatakan kurang mudah dan terdapat 13,33 persen responden yang menyatakan tidak mudah dalam mengurus kebutuhan program pengembangan jeruk siem. Responden yang menyatakan mudah karena dalam memenuhi kebutuhan selama mengikuti program pengembangan jeruk siem

dapat dengan mudah dipenuhi, sedangkan responden yang menganggap kurang mudah karena tidak semua kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mudah. Secara umum dapat dikatakan bahwa petani mendapat cukup kemudahan dalam mengurus kebutuhan mereka selama mengikuti program pengembangan jeruk siem tersebut, baik kebutuhan penyuluhan, petunjuk maupun kebutuhan lainnya yang bersifat teknis operasional seperti penggunaan pupuk pemeliharaan tanaman dan lain-lain. Hal tersebut karena pelaksana di lapangan menggunakan *standar operational procedure* dalam melaksanakan implementasi program pengembangan jeruk siem di kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe selatan. Dengan menggunakan SOP, pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan, Edward III dalam Winarno,(2005:150).

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem

1. Faktor Penekan/Penghambat

Dalam implementasi program pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan, perlu diantisipasi faktor-faktor penekan yang dapat mengganggu jalannya implementasi program yang telah direncanakan. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa salah satu faktor penghambat yang hingga saat ini belum dapat

diantisipasi dengan baik adalah banyaknya pelaku, baik dari masyarakat petani maupun dari pelaksana (petugas dan aparat terkait).

Banyaknya pelaku apabila tidak diorganisasikan dengan baik, akan dapat mengakibatkan tumpang tindihnya pelaksanaan di lapangan dan akan mengakibatkan terjadinya salah komunikasi antara petani dan petugas lapangan serta aparat pelaksana dalam mengimplementasikan program-program yang sudah ada.

Dari hasil observasi di lapangan ternyata sebagian besar petani menganggap bahwa dalam implementasi program pengembangan jeruk siem, pelaku yang terlibat cukup banyak sehingga mempengaruhi kegiatan bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan. Tanggapan responden dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Banyaknya pelaku yang terlibat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Terlalu banyak	29	64,44
2	Banyak	13	28,88
3	Kurang banyak	3	6,67
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel tersebut menunjukkan bahwa responden lebih cenderung menganggap pelaku yang terlibat terlalu banyak yaitu 64,44 persen karena menganggap pelaku yang terlibat dalam implementasi program

pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu dan 6,67 persen menyatakan kurang banyak, karena menganggap implementasi program yang dilaksanakan belum berlangsung dengan baik karena tidak didukung oleh jumlah pelaksana yang cukup.

Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa responden yang menyatakan pelaku yang terlibat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem terlalu banyak karena di daerahnya lebih banyak pelaku yang menganggur dan tidak melaksanakan aktivitas yang berarti kepada petani untuk memberikan pemahaman mengenai program ini, sedangkan responden yang menganggap kurang disebabkan karena menganggap belum semua petani mampu dilayani oleh pelaku yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan pendapat responden mengenai ketersediaan pelaku dalam implementasi program pengembangan jeruk siem berbeda antar responden.

Hasil wawancara diketahui bahwa adanya kelebihan pelaku (petugas lapangan dan aparat) dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem, disebabkan adanya pertimbangan tertentu seperti :

- a. Lokasi penyuluhan adalah lokasi yang sangat berpotensi dan memiliki jumlah petani yang banyak dari daerah dan kelurahan/desa lainnya, sehingga memerlukan jumlah pelaku yang lebih banyak.
- b. Daerah yang bersangkutan merupakan percontohan pengembangan jeruk siem, sehingga dianggap lebih memerlukan perhatian dibanding daerah lain.

- c. Daerah bersangkutan merupakan daerah baru yang dijadikan sasaran implementasi dan masyarakat petani benar-benar belum memahami arti dan mekanisme program kebijakan yang akan diimplementasikan.

Hal tersebut sesuai syarat berjalannya suatu organisasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources), sebagaimana dikemukakan oleh Edward III bahwa sumber daya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang di dalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan yang diposisikan sebagai input dalam organisasi bertalian dengan kemampuan melakukan transformasi dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai. Kurang berhasilnya implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak memadai atau tidak kompeten dalam bidang implementasi kebijakan.

Selain faktor penekan diatas, diketahui bahwa ada faktor lain yang dapat menekan implementasi program pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan adalah adanya loyalitas ganda dari petani, yakni adanya pilihan cara dan metode lain yang dilaksanakan selain metode, cara serta mekanisme dari program yang diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa petani belum sepenuhnya percaya akan keberhasilan implementasi program tersebut khususnya dalam rangka peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani.

Mengenai tanggapan tingkat kepercayaan petani terhadap keberhasilan program pengembangan jeruk siem dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Pernyataan responden tentang kepercayaan mereka akan keberhasilan program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Percaya	21	46,66
2	Kurang percaya	15	33,33
3	Tidak percaya	9	20,00
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tanggapan responden pada tabel 4.19 tersebut ternyata menunjukkan bahwa belum seluruh petani di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu percaya terhadap keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem dapat meningkatkan produksi jeruk siem, karena terdapat 46,66 persen responden menyatakan percaya akan keberhasilan program pengembangan jeruk siem dan terdapat 33,33 persen responden yang menyatakan kurang percaya, dan terdapat 20 persen responden yang menyatakan tidak percaya terhadap keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem.

Responden yang menyatakan masih kurang percaya terhadap keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem di desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu disebabkan karena responden tersebut belum memahami sepenuhnya tujuan dan sasaran program tersebut, sehingga

partisipasi mereka dalam implementasi program pengembangan jeruk siem terkesan bersifat coba-coba. Kondisi tersebut mengancam keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem, karena implementasi program ini pada dasarnya tidak dapat dicampur adukkan kegiatannya dengan cara coba-coba dan akan mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Adanya loyalitas ganda dari petani dalam menterjemahkan dan melaksanakan program pengembangan jeruk siem selain mempengaruhi tingkat keberhasilannya, juga akan dapat mengakibatkan timbulnya pengaruh terhadap petani lain yang belum memahami program ini dengan tetap melaksanakan cara dan mekanisme lama dalam pengembangan jeruk siem. Dalam banyak kasus (Warwick dalam Aries), salah satu faktor penghambat dalam implementasi kebijakan adalah terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda dari petugas pelaksana, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lainnya.

Faktor lain yang juga merupakan faktor penekan/penghambat adalah kemitraan program yang belum berlangsung dengan baik. Kemitraan program yang dimaksud adalah adanya kerjasama yang baik dengan instansi atau lembaga terkait untuk melaksanakan program tersebut sehingga lebih mudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Tanggapan responden mengenai kemitraan program dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.20

Kemitraan program pada implementasi program pengembangan jeruk siem

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ada	11	24,44
2	Tidak ada	34	75,56
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tanggapan responden pada tabel tersebut memperlihatkan bahwa belum ada kemitraan program yang dapat dilaksanakan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem, karena sebanyak 75,56 persen responden memberi pernyataan tidak ada kemitraan program.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sejak diluncurkannya kebijakan implementasi program pengembangan jeruk siem, belum ada upaya dari instansi/lembaga terkait lain untuk menjalin kemitraan dalam mengimplementasikan program tersebut ke petani. Hal ini juga mempengaruhi keberhasilan yang akan diwujudkan karena dengan kemitraan program kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan akan lebih mudah dan dapat mencapai target dengan baik

Wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa langkah-langkah untuk mewujudkan kemitraan dengan lembaga terkait lainnya belum dapat dilaksanakan hingga saat ini mengingat hasil-hasil yang dicapai meskipun sudah nampak namun belum mampu meningkatkan minat pihak lain untuk bersama-sama mengupayakan implementasi program dengan baik, efisien, efektif sehingga dapat lebih memberdayakan petani.

Selain tiga faktor yang telah disebutkan di atas, masih terdapat faktor lain yang juga berpotensi menekan/menghambat implementasi program pengembangan jeruk siem. Faktor tersebut adalah jenjang pengambilan keputusan yang belum dilaksanakan dengan baik. Struktur keputusan yang dimaksud adalah berupa langkah-langkah pengambilan keputusan dari atas hingga implementasinya oleh petugas lapangan. Kurang baiknya struktur pengambilan keputusan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem dapat dilihat dari terlambatnya penanganan permasalahan di lapangan karena pengambilan keputusan yang kurang jelas sehingga aparat pelaksana di lapangan sangat tergantung pada instruksi dari atas. Mengenai tanggapan responden mengenai keterlambatan implementasi program di lapangan dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Keterlambatan penanganan permasalahan dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sangat terlambat	19	42,44
2	Terlambat	11	24,44
3	Tepat waktu	15	33,33
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tanggapan responden tersebut menunjukkan bahwa penanganan implelementasi program pengembangan jeruk siem di desa lambodi jaya kecamatan Lalembuu masih sering terlambat, hal ini ditunjukkan oleh 42,22

persen responden menyatakan sangat terlambat 24,44 persen responden yang menyatakan terlambat dan 33,33 persen menyatakan tepat waktu.

Keterlambatan sering terjadi pada penanganan langkah-langkah implementasi di lapangan karena adanya kebijakan yang terlambat diambil dari mekanisme kerja. Keterlambatan juga mempengaruhi kelancaran implementasi, sebab program bisa saja tertunda karena harus menunggu keputusan dari jenjang yang paling atas.

Sejalan dengan pendapat Warwick dalam Aries "Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak", makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak juga bisa menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan.

2. Faktor Pendorong

Untuk mewujudkan terlaksananya implementasi program pengembangan jeruk siem, perlu memanfaatkan faktor-faktor pendorong yang akan diberdayakan sehingga mampu menjamin kelancaran mekanisme implementasinya di lapangan agar tujuan-tujuan yang ada dapat direalisasikan.

Salah satu faktor tersebut adalah dukungan pimpinan, apabila pelaksanaan implementasi didukung sepenuhnya oleh pimpinan maka pelaksanaannya di lapangan akan berjalan dengan lancar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dukungan pimpinan terhadap implementasi program

pengembangan jeruk siem sudah baik. Tanggapan responden mengenai hal ini dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.22
Dukungan pimpinan terhadap implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mendukung	39	86,66
2	Kurang mendukung	6	13,33
3	Tidak mendukung	0	0,00
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Pernyataan responden pada tabel 4.22 tersebut menunjukkan bahwa dukungan pimpinan terhadap implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik, hal ini didukung oleh 86,66 persen responden menyatakan sangat mendukung dan hanya 13,33 persen memberi pernyataan kurang mendukung.

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pimpinan sangat mendukung implementasi program pengembangan jeruk siem dengan tindakan-tindakan :

- a. Menyediakan berbagai kebutuhan di lapangan dalam rangka implementasi program pengembangan jeruk siem seperti fasilitas penyuluhan, kendaraan dinas, dan lain-lain
- b. Mengupayakan adanya peningkatan keterampilan petugas penyuluh dengan memberi kesempatan kepada penyuluh mengikuti diklat teknis sehubungan dengan bidang tugasnya.

- c. Memberi pengarahan terhadap semua petugas lapangan sebelum melaksanakan tugas-tugas di lapangan.
- d. Menginstruksikan pembuatan laporan atas kemajuan dan hambatan yang dijumpai dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

Adanya langkah-langkah tersebut diatas menunjukkan bahwa perhatian pimpinan dalam rangka implementasi program pengembangan jeruk siem. Dukungan pimpinan tersebut menyebabkan aparat yang bertugas di lapangan dapat dengan baik untuk mewujudkan tujuan-tujuan implementasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Selain dukungan pimpinan, komitmen aparat pelaksana juga menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem. Dari penelitian diketahui bahwa komitmen pelaksana untuk mewujudkan implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik. Tanggapan responden mengenai hal ini dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Komitmen pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Baik	39	86,66
2	Kurang baik	4	8,89
3	Tidak baik	2	4,44
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Pernyataan responden tersebut menunjukkan bahwa komitmen pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik, hal ini berdasarkan pernyataan mereka sebanyak 86,66 persen menyatakan baik dan terdapat 8,89 persen menyatakan kurang baik.

Pengamatan juga dilakukan dan diperoleh bahwa pada dasarnya komitmen pelaksana terhadap upaya mewujudkan implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik, hal ini dibuktikan :

- a. Kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada petani yang sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu
- b. Kedisiplinan pelaksana di lapangan yang cukup baik
- c. Perhatian pelaksana terhadap permasalahan petani dan hambatan yang dijumpai sepenuhnya menjadi sasaran dan perhatian.

Meskipun komitmen pelaksana sudah baik dengan tindakan-tindakan seperti yang sudah disebutkan di atas, namun pada dasarnya masih perlu lebih ditingkatkan lagi khususnya profesionalisme yang ditunjukkan masih kurang. Kondisi ini menyebabkan pemberian bimbingan, penyuluhan tata kerja di lapangan sebagian petani masih belum dapat berhasil untuk mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan yang sudah disampaikan. Hal tersebut sesuai dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan Van Meter dan Carl E. Van Horn (*A Model of the Policy implementation Process*) dalam Subarsono salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi adalah disposisi implementor.

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal penting, yakni : a) respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Faktor pendorong lain yang diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan implementasi program pengembangan jeruk siem adalah kemampuan organisasi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan dalam mengimplementasikan program tersebut. Dari pengamatan terlihat bahwa dalam implementasi program kemampuan kedua instansi tersebut sudah baik, tanggapan responden mengenai hal ini dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Kemampuan instansi pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Mampu	33	73,33
2	Kurang mampu	9	20,00
3	Tidak mampu	3	6,66
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Dari tabel 4.24 tersebut diketahui bahwa kemampuan instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk

siem sudah baik, karena terdapat 73,33 persen responden menyatakan mampu dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

Kemampuan organisasi dalam implementasi program pengembangan jeruk siem dapat dilihat dari sejumlah faktor, yaitu kemampuan menjalankan mekanisme dan prosedur, kemampuan sumberdaya manusia, kemampuan menyediakan sarana dan prasarana serta kemampuan dalam pembiayaan/penyediaan dana. Dari pengamatan keempat faktor tersebut telah dipenuhi dengan baik oleh instansi pelaksana, meskipun masih harus dioptimalkan lagi.

Dari hasil wawancara terungkap bahwa kemampuan instansi pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik jika dilihat dari sisi proses dan prosedur kerja, karena mekanisme dan tahapan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar prosedur operasional (SPO) yang ada. Sedangkan dari sisi sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan lagi utamanya sisi kualitasnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Van Meter dan Carl E. Van Horn bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources), dalam berbagai program pemerintah, keberhasilan maupun ketidak berhasilan banyak ditentukan oleh kualitas aparat pelaksananya.

Faktor pendorong lain yang juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi program pengembangan jeruk siem adalah dukungan dari

masyarakat luas, apakah masyarakat dapat menerima program tersebut sehingga terjadi partisipasi aktif didalamnya atau sebaliknya.

Berikut dikemukakan pernyataan responden tentang penerimaan mereka terhadap implementasi program pengembangan jeruk siem

Tabel 4.25
Dukungan masyarakat dalam implementasi program pengembangan jeruk siem.

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Menerima	33	73,33
2	Kurang menerima	10	22,22
3	Tidak menerima	2	4,44
	Jumlah	45	100

Sumber : Data primer diolah, 2009

Tabel 4.25 tersebut menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap implementasi program cukup baik dimana terdapat 73,33 persen responden menyatakan sangat menerima implementasi program pengembangan jeruk siem, 22,22 persen menyatakan cukup menerima dan hanya 4,44 persen menyatakan kurang menerima. Responden yang menyatakan sangat menerima dan cukup menerima adalah responden yang sudah memahami dan mengerti akan tujuan dan sasaran dari implementasi program ini dan 22,22 persen dari mereka adalah responden yang masih ragu-ragu karena lahan yang mereka miliki dipersiapkan untuk komoditi lain (tanaman pangan). Zamhuri dalam Mufti menyatakan bahwa salah satu unsur penting yang perlu

diperhatikan pada proses implementasi kebijakan yaitu adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. Van Meter dan Carl E. Van juga mengemukakan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik turut mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan, yakni mendukung atau menolak, opini publik dan dukungan elite politik terhadap implementasi kebijakan. Hykumiawan juga mengemukakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik selain isi atau content kebijakan tersebut, implementor dan kelompok target juga dipengaruhi oleh lingkungan; keadaan sosial-ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi sosial-ekonomi sebuah masyarakat yang maju, sistem politik yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari konstituen maupun elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.

D. Implementasi program pengembangan jeruk siem melalui BLM/BPLM/PMUK

Implementasi program pengembangan jeruk siem bagi petani peserta di desa lambodi jaya yang dikembangkan melalui pola Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)/Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM)/Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Dana bantuan ini diberikan kepada kelompok sasaran yaitu kelompok Mekar Sari sebesar Rp. 45.000.000,- dan kelompok tani Harapan Jaya sebesar Rp. 45.000.000,- yang ditransfer langsung ke rekening kelompok, adapun proses pencairan dananya, kelompok tani diwajibkan menyusun rencana usaha kelompok (RUK) yang dibimbing oleh petugas lapangan sesuai dengan kebutuhan kelompok sebagaimana diuraikan pada tabel 4.26 berikut :

Tabel 4.26

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Harapan Jaya

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembuatan Lubang	8.000 lbg	750	6.000.000
2	Bibit Jeruk	8.000 phn	3.500	28.000.000
3	Pupuk :Urea	2.000 kg	1.200	2.400.000
4	SP36	1.000 kg	1.500	1.500.000
5	KCl	1.000 kg	2.800	2.800.000
6	Herbisida	80 ltr	41.250	3.300.000
7	Furadan	80 kg	12.500	1.000.000
	Jumlah	-	-	45.000.000

Sumber : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, 2005

Tabel 4.26 tersebut menunjukkan RUK Harapan Jaya dengan jumlah anggota 20 orang, volume usaha 20 Ha dengan rata-rata kepemilikan lahan 1 Ha per anggota dan jenis usaha budidayanya jeruk siam. Selanjutnya pemenuhan

jenis kebutuhan tersebut di atas akan dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara instansi pelaksana dengan kelompok sasaran dengan memindah bukukan dana tersebut ke rekening kelompok tani Harapan Jaya pada bank terdekat dengan lokasi kegiatan

Tabel 4.27
Rencana Usaha Kelompok (RUK) Mekar Sari

No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Pembuatan Lubang	8.000 lbg	750	6.000.000
2	Bibit Jeruk	8.000 phn	3.500	28.000.000
3	Pupuk :Urea	2.000 kg	1.200	2.400.000
	SP36	1.000 kg	1.500	1.500.000
	KCl	1.000 kg	2.800	2.800.000
4	Herbisida	80 ltr	41.250	3.300.000
5	Furadan	80 kg	12.500	1.000.000
	Jumlah	-	-	45.000.000

Sumber : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, 2005

Tabel 4.27 tersebut menunjukkan RUK Mekar Sari dengan jumlah anggota 25 orang, volume usaha 20 Ha, dengan rata-rata kepemilikan lahan antara 0,25 - 1 Ha per anggota dan jenis usaha budidayanya jeruk siam. Selanjutnya pemenuhan jenis kebutuhan tersebut di atas akan dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara instansi pelaksana dengan kelompok sasaran dengan memindah bukukan dana tersebut ke rekening kelompok tani Mekar Sari pada bank terdekat dengan lokasi kegiatan.

E. Informasi Produksi Tanaman Jeruk Siem dan Harganya ditingkat petani

Produksi tanaman jeruk siem dalam satuan hektar sangat ditentukan oleh jumlah populasi tanaman dan tanaman yang menghasilkan. Merujuk pada

Standar Prosedur Operasional maka dalam 1 (satu) hektar populasi tanaman jeruk siem berjumlah 400 pohon dengan jarak tanam 5 x 5 meter. Untuk lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.28
Produksi jeruk siem, Harga jual per kg dan harga yang diterima petani peserta implementasi program pengembangan jeruk siem

Kelompok Tani : Mekar Sari

No	Nama Responden	Luas (Ha)	Phn Jeruk yg menghasilkan (Phn)	Produksi/ Pohon (Kg)	Jumlah Produksi (Kg)	Harga Jual Per Kg	Harga yang diterima petani (Rp)
1	Choiru Najib	1	400	23	9.200	1.300	11.960.000
2	Fakhrudin	0,75	370	21	7.770	1.300	10.101.000
3	Junandoyo	0,75	360	22	7.920	1.300	10.296.000
4	Hasani	0,75	372	21	7.812	1.300	10.155.600
5	Sabang	0,75	376	21	7.896	1.300	10.264.800
6	Sauji	0,75	378	21	7.938	1.300	10.319.400
7	kasiran	0,75	360	22	7.920	1.300	10.296.000
8	Yuri. P	0,75	350	22	7.700	1.300	10.010.000
9	Agung D	0,75	365	21	7.665	1.300	9.964.500
10	Meli	0,75	375	22	8.250	1.300	10.725.000
11	Sulaeman	1	396	23	9.108	1.300	11.840.400
12	Slamet W	1	380	23	8.740	1.300	11.362.000
13	Wayan Renda	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
14	Runah	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
15	Mulyawan	1	400	22	8.800	1.300	11.440.000
16	Dewa Wedok	1	380	23	8.740	1.300	11.362.000
17	Jilman	1	380	23	8.740	1.300	11.362.000
18	Arsad	1	377	20	7.540	1.300	9.802.000
19	Kadir	1	365	22	8.030	1.300	10.439.000
20	Bidin	1	345	23	7.935	1.300	10.315.500
21	Mapiase	0,5	200	20	4.000	1.300	5.200.000
22	Nurdin	0,5	192	21	4.032	1.300	5.241.600
23	Ruddin	0,5	185	21	3.885	1.300	5.050.500
24	Pujawan Sri	0,5	165	20	3.300	1.300	4.290.000
25	Diji	0,25	93	22	2.046	1.300	2.659.800
	Jumlah	20	8.364				236.297.100

Data : diolah, 2009

Hasil wawancara diperoleh informasi bahwa produksi tanaman jeruk siem untuk masa 1 (satu) kali panen berada pada kisaran 21 - 30 kg/pohon. Sehingga

jumlah produksi diperoleh dari jumlah pohon yang menghasilkan dikali dengan rata-rata produksi per pohon dalam kilogram. Dari tabel tersebut di atas diperoleh informasi bahwa :

Pada kelompok tani Mekar Sari, jumlah anggota kelompok 25 (dua puluh lima) orang dengan kepemilikan lahan yang masuk dalam implementasi program pengembangan jeruk siem antara 0,25 – 1,00 hektar. Dari jumlah tersebut terdapat 5 orang atau 20 persen petani dalam kelompok mampu menghasilkan produksi jeruk siem antara 2.000 – 7.000 kilogram dengan harga jual Rp. 1.300/kg, petani menerima harga jual antara Rp. 2.000.000 sampai dengan Rp. 6.000.000,- dan terdapat 20 orang atau 80 persen petani dalam kelompok tersebut mampu menghasilkan jeruk siam dengan produksi 7.001 – 10.000 kilogram dengan kisaran penerimaan harga jual antara Rp, 6.000.000 – 12.000.000,-

Kelompok tani Harapan Jaya, jumlah anggota 20 (dua puluh) orang dengan rata-rata kepemilikan lahan yang masuk dalam implementasi program pengembangan jeruk siem 1 hektar, lebih jelasnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.29
Produksi jeruk siem, Harga jual per kg dan harga yang diterima petani peserta implementasi program pengembangan jeruk siem

Kelompok Tani : Harapan Jaya

No	Nama Responden	Luas (Ha)	Phn Jeruk yg menghasilkan (Phn)	Produksi/ Pohon (Kg)	Jumlah Produksi (Kg)	Harga Jual Per Kg	Harga yang diterima petani (Rp)
1	Imam Musoli	1	365	20	7.300	1.300	9.490.000
2	Sukirman	1	354	20	7.080	1.300	9.204.000
3	Riono	1	353	20	7.060	1.300	9.178.000
4	Imam Sukadi	1	400	23	9.200	1.300	11.960.000
5	Ritam	1	400	23	9.200	1.300	11.960.000
6	Muhajir	1	371	21	7.791	1.300	10.128.300
7	Hasan	1	389	23	8.947	1.300	11.631.100
8	Yusuf	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
9	Samuri	1	398	21	8.358	1.300	10.865.400
10	Hadi Prayitno	1	392	23	9.016	1.300	11.720.800
11	Ketut Nadi	1	329	23	7.567	1.300	9.837.100
12	Caturiono	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
13	Rustam	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
14	Japar	1	355	20	7.100	1.300	9.230.000
15	Lanco	1	357	21	7.497	1.300	9.746.100
16	M.Taufik	1	400	21	8.400	1.300	10.920.000
17	Sunata Yasa	1	400	22	8.800	1.300	11.440.000
18	Karim	1	400	22	8.800	1.300	11.440.000
19	Mail	1	323	19	6.137	1.300	7.978.100
20	Kristiono	1	321	18	5.778	1.300	7.511.400
	Jumlah	20					207.000.300

Sumber : Data diolah, 2009

Diperoleh informasi bahwa :

Terdapat 2 orang atau 10,00 persen petani dalam kelompok tersebut mampu menghasilkan produksi jeruk siem antara 2.000 – 7.000 kilogram dengan harga jual Rp. 1.300/kg, petani menerima harga jual antara Rp. 7.000.000 sampai dengan Rp. 8.000.000,- dan terdapat 18 orang atau 90 persen petani dalam kelompok tersebut mampu menghasilkan jeruk siem dengan produksi 8.000 – 9.000 kilogram dengan kisaran penerimaan harga jual antara Rp. 10.000.000 – 11.000.000,-

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam peningkatan produksi jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem dalam peningkatan produksi jeruk siem dilaksanakan dengan menerapkan empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur/tata aliran kerja. Keempat variabel tersebut pada umumnya masuk dalam kategori cukup, namun beberapa diantaranya perlu mendapat perhatian, seperti variabel komunikasi belum seluruhnya efektif menghasilkan persepsi dan komitmen yang sama dalam mengakomodasikan kebijakan pengembangan jeruk siem, hal ini disebabkan karena masih terdapat pesan yang disampaikan dalam komunikasi kurang akomodatif, sehingga isi pesan cenderung ke substansi rutin/normatif. Terungkap aspek kritis pada variabel sumberdaya yaitu masih terdapat kategori kurang mampu dan tidak mampu dalam pengimplementasian kebijakan. Upaya perbaikan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan kemampuan petugas dan aparat yang terlibat dalam pemberdayaan petani. Variabel sikap pelaksana perlu terus didorong sehingga tidak hanya sampai pada sikap aktif tetapi lebih diharapkan sikap pro aktif. Variabel tata aliran kerja berjalan sesuai harapan dimana petani mendapat cukup kemudahan

dalam mengurus kebutuhan mereka, karena dalam tata aliran kerja diterapkan SOP dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan yang telah direncanakan yaitu faktor penekan dan faktor pendorong implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem.

- Faktor penekan

Hasil analisis ditemukan bahwa banyaknya pelaku, loyalitas ganda, kemitraan program dan jenjang pengambilan keputusan sejak diluncurkannya implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem cukup mempengaruhi implementasi program, hal ini dapat dilihat dengan adanya pilihan/metode lain dari program yang diimplementasikan karena terdapat loyalitas ganda dari petani dalam menterjemahkan dan melaksanakan program pengembangan jeruk siem, belum adanya jalinan kemitraan dari lembaga/instansi lain dalam mengimplementasikan kebijakan sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, masih lambatnya penanganan apabila implementasi dilapang mendapat hambatan, karena jenjang pengambilan keputusan belum dilaksanakan dengan baik.

- Faktor pendorong

Hasil analisis ditemukan bahwa dukungan pimpinan, komitmen pelaksana, kemampuan instansi pelaksana dan dukungan masyarakat cukup baik dalam implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem.

Kondisi ini ditunjukkan dalam pemberian bimbingan, penyuluhan tata kerja di lapangan sebagian petani telah berhasil mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan yang sudah disampaikan. Kemampuan instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program pengembangan jeruk siem sudah baik, meskipun masih harus dioptimalkan lagi. Hasil wawancara terungkap bahwa kemampuan instansi pelaksana dalam implementasi program pengembangan jeruk siem sudah baik jika dilihat dari sisi proses dan prosedur kerja, karena mekanisme dan tahapan pelaksanaan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Sedangkan dari sisi sumberdaya manusia masih perlu ditingkatkan lagi utamanya sisi kualitasnya. Dukungan masyarakat terhadap implementasi program hal ini ditunjukkan oleh banyak responden menyatakan menerima implementasi program pengembangan jeruk karena telah memahami tujuan dari implementasi program. Namun masih terdapat pula yang menyatakan kurang menerima dan menyatakan tidak menerima, karena belum memahami dan mengerti akan tujuan dan sasaran dari implementasi program dan masih ragu-ragu karena lahan yang mereka miliki dipersiapkan untuk komoditi lain (tanaman pangan).

B. S A R A N

Sebagaimana telah dibahas pada kesimpulan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai variabel yang saling terkait, berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lain dan merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Variabel komunikasi masih perlu ditingkatkan karena terdapat pesan yang disampaikan dalam komunikasi kurang akomodatif, begitu pula variabel sumberdaya masih perlu menjadi perhatian besar baik peserta maupun petugas melalui pelatihan, pertemuan serta sosialisasi. Variabel sikap pelaksana perlu terus dipertahankan karena telah menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodijaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.
2. Banyaknya pelaku, loyalitas ganda, kemitraan program dan jenjang pengambilan keputusan merupakan faktor penekan dalam implementasi kebijakan, olehnya itu harus menjadi perhatian utama bagi pengambil kebijakan untuk mencegah pengaruh yang lebih besar.
3. Dukungan pimpinan, komitmen pelaksana, kemampuan instansi pelaksana, dan dukungan masyarakat merupakan faktor pendorong dalam implementasi program pengembangan jeruk siem meskipun telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi masih perlu dioptimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (1986). Hasil Penelitian : *Alternatif Kebijakan Pembangunan Desa*. Ujung Pandang : Balai Penelitian Unhas.
- _____, (1990). Kumpulan Makalah : *Masalah-Masalah Administrasi Pembangunan Daerah*. Ujung Pandang : Fisipol Unhas.
- Abidin, Said Zainal. (2004). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Sawah.
- Agustino, Leo. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI Bandung.
- Anderson, James E. (1979). *Public Policy Making*. New York ; Holt, Rencelt and Winston.
- Aries, (2009). <http://www.ariesblog.files.wordpress.com/2009/12/bab-II-kajian-pustaka> (unduh tgl. 9/8/2010).
- Badan Pusat Statistik, (2008). *Sulawesi Tenggara Dalam Angka*.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. (2002). *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Bahri, Syamsul. (2004). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Perkebunan Kakao di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka*. Makassar : Tesis Administrasi Pembangunan PPS Unhas.
- Didjaja, AR Mustopa (1992). *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Penerapannya dalam rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta : LP-FE-UI.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Edward III, George C. (1978). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prantice Hall.
- _____. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Merilee S. (1980). *Politic and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey : Princeton Univercity Press.

- Hall, Richard D. and Robert E Quinn, (1983). *Organizational Theory and Public Policy*. London : Sage Publication.
- Harafah, L. M. (2008). *Kesepadanan Sains Sekelumit Filsafat, Ekonomi dan Metodologi Penelitian*. Edisi Revisi, Kendari : Universitas Haluoleo Press.
- Haryono, Feby S. (2005). Tesis : *Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Tangerang*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Hariyoso, H. S. (2002). *Pembaruan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Peradaban.
- Hernani. (1997). *Skripsi : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijaksanaan Pengendalian dan Penertiban Peredaran Minuman Keras*. Yogyakarta : Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM.
- Ibrahim, Amin. (2004). *Pokok-Pokok Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Irawan, Prasetya. (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Islamy, M, Irfan. (2003). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasim, Azhar. (1989). *Pengukuran Efektifitas dalam Organisasi*. Jakarta : PAU-UI.
- Kertyawitaradya. (2010). *Implementas Kebijakan Model G.C Edward III*
<http://kertyawitaradya.wordpress.com/tag/cg-edward-iii/>
- Kismartini, dkk. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Materi Pokok MAPU 5301*, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Maharani, Restuningrum. (2009). *Teori Kewenangan*.
<http://restuningmaharani.blogspot.com/2009/10/teori-kewenangan.html>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Massofa. (2008). *Ekonomi Pertanian*
<http://massofa.wordpress.com/2008/03/20/teori-produksi-pada-pertanian/>
- Mufti, M. I. (1992). *Kebijaksanaan Gerakan Desa Makmur Merata dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Muna*. Tesis. Ujung Pandang : PPS-Universitas Hasanuddin.

- Mulyono (2009). *Model Implementasi Kebijakan-George-Edward-III/*
Mulyono.staff.uns.ac.id/.../model-implementasi-kebijakan-george-edward-III/ -28 Mei 2009
- Murtiasih, Sri. (2009). *Teori Produksi dan Kegiatan Perusahaan.*
[murti.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10297/Teori Produksi](http://murti.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10297/Teori%20Produksi)
- Nakamura, Robbert .T, et.al. (1980). *The Politics of Policy Implementation. USA :*
St. Martini 's Press.
- Nawawi, H. Hadar, (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogyakarta : Gajah
 Mada University Press.
- Notoatmodjo Sukidjo, Dr.(2002). *Metodologi Penelitian,* Jakarta : PT. Rineka
 Cipta.
- Nugraha, Muhammad Qudrat. (2007). *Manajemen Strategi Organisasi Publik.*
 Buku Materi Pokok MAPU 5302 Modul 1-9, Jakarta : Universitas Terbuka.
- Nur Cahyo, Bagus. (2001). *Teori Ekonomi Mikro.*
[bagus.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9993/Slide BAB V.](http://bagus.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9993/Slide_BAB_V)
- Safrina, Dian. (2003). Skripsi : *Studi Formulasi Kebijakan,* Yogyakarta : Jurusan
 Ilmu Administrasi Negara. UGM.
- Salusu, J. (1996). *Rencana Strategik.* Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi.*
 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi
 Daerah,* Jakarta : Depok Citra Utama.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik.* Bandung : Lemlit Unpad.
- Tangkilswan Hesel Nogi S, Drs, M.Si. (2000). *Kebijakan Publik Yang Membumi :
 Konsep, Strategi dan Kasus.* Jakarta : Yayasan Pembaruan Adminisrasi
 Publik Indonesia Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. (2002). *Analisis Kebijaksanaan.* Jakarta : Bumi Aksara.
- _____ (2004). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi Implementasi
 Kebijaksanaan Negara.* Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik : proses analisis*. Jakarta : Intermedia.

Widiastuti Pratiwi. (2006). *Skripsi : Dinamika Kebijakan Bus Perkotaan di Yogyakarta*. Jurusan Administrasi Negara : UGM.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Universitas Terbuka

DAFTAR PERTANYAAN

Universitas Terbuka

IDENTITAS

1. Nama
2. Tempat dan tgl. Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Status Perkawinan
5. Agama

DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan/Pernyataan	Lingkirlah Jawaban yang sesuai			Arti Jawaban
		a	b	c	
	KOMUNIKASI				
1.	Apakah ada sosialisai tentang program pengembangan tanaman jeruk siem	a	b		a = Pernah b = Tidak Pernah
2.	Apakah sering dilakukan pertemuan (interaksi) petani dan petugas/penyuluh tentang program pengembangan jeruk siem ?	a	b	c	a = Sering b = Kadang-kadang c = Tidak Pernah
3.	Apakah petugas/aparat desa sering melakukan komunikasi dengan petani tentang kegiatan program pengembangan jeruk siem ?	a	b	c	a = Mengerti b = Kurang Mengerti c = Tidak Mengerti
4.	Apakah bapak/ibu memahami/mengerti kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya	a	b	c	a = Diterima b = Kurang Diterima c = Tidak Diterima
5.	Apakah bapak/ibu dapat menerima kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya	a	b	c	a = Dilakukan b = Kurang Dilakukan c = Tidak Dilakukan
6.	Apakah aparat desa/kecamatan/petugas telah melakukan penyuluhan pengembangan jeruk siem di desa lambodi jaya	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu
	SUMBER DAYA				
1	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan petugas lapangan dalam menyampaikan kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu
2	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan sumberdaya petugas dalam mesosialisasikan dan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu
3	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan petugas lapangan/aparat yang terlibat dalam memberdayakan petani dan masyarakat lokal dalam pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu
4	Bagaimana tanggapan anda mengenai kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam mewujudkan sikap kebersamaan antara petani dalam implementasi program pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu

No	Pertanyaan/Pernyataan	Lingkariah Jawaban yang sesuai			Arti Jawaban
		a	b	c	
	SIKAP PELAKSANA				No.11 - 14
1	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan jeruk siem di desa lambodi jaya	a	b	c	a = Baik b = Kurang Baik c = Tidak Baik
2	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap ramah petugas dalam memberikan pelayanan	a	b	c	a = Ramah b = Kurang Ramah c = Tidak Ramah
3	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap pelaksana/ petugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan	a	b	c	a = Baik b = Kurang Baik c = Tidak Baik
4	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap transparansi pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Transparan b = Kurang Transparan c = Tidak Transparan
	TATA ALIRAN/STRUKTUR BIROKRASI				
1	Bagaimana tanggapan anda mengenai kemudahan dalam mengurus kebutuhan kebijakan dalam pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Mudah b = Kurang Mudah c = Tidak Mudah
	FAKTOR PENGHAMBAT/PENEKAN				
1	Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program pengembangan jeruk siem apakah jumlah pelaku yang terlibat dalam program tersebut :	a	b	c	a = Banyak b = KurangBanyak c = Tidak Banyak
2	Apakah anda percaya program ini akan berhasil ?	a	b	c	a = Percaya b = Kurang Percaya c = Tidak Percaya
3	Apakah ada mitra dari instansi lain yang berhubungan dengan pengembangan jeruk	a	b		a = Ada b = Tidak Ada
4	Dalam pelaksanaan program ini apakah tidak selalu mengalami keterlambatan penanganan di lapangan	a	b	c	a = Sering Terlambat b = Terlambat c = Tepat Waktu

No	Pertanyaan/Pernyataan	Lingkari Jawaban yang sesuai			Arti Jawaban
		a	b	c	
1	FAKTOR PENDORONG Bagaimana tanggapan anda tentang dukungan pimpinan mulai dari Dinas sampai Ke Ketua Kelompok	a	b	c	No.20 - 23 a = Mendukung b = Kurang Mendukung c = Tidak Mendukung
2	Dengan adanya program ini apakah komitmen pelaksana sudah sudah baik untuk mewujudkan implementasi pengembangan jeruk	a	b	c	a = Baik b = Kurang Baik c = Tidak Baik
3	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan instansi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	a = Mampu b = Kurang Mampu c = Tidak Mampu
4	Dengan adanya program ini, menurut saudara apakah masyarakat secara umum dapat menerima	a	b	c	a = Menerima b = Kurang Menerima c = Tidak Menerima

Universitas Terbuka

TABULASI

Universitas Terbuka

IDENTITAS RESPONDEN

Kode Responden	Nama Petani	Luas (Ha)	Kelompok Tari
A1	Choiru Najib	1,00	Mekar Sari
A2	Fakihudin	0,75	
A3	Juandoyo	0,75	
A4	Hasani	0,75	
A5	Sabang	0,75	
A6	Sauji	0,75	
A7	Kasiran	0,75	
A8	Yuri.P	0,75	
A9	Agung D	0,75	
A10	Meli	0,75	
A11	Sulaeman	1,00	
A12	Slamet Wardoyo	1,00	
A13	Wayan Renda	1,00	
A14	Runah	1,00	
A15	Mulyawan	1,00	
A16	Dewa Wedok	1,00	
A17	Jilman	1,00	
A18	Arsad	1,00	
A19	Kadir	1,00	
A20	Bidin	1,00	
A21	Mapiase	0,50	Harapan Jaya
A22	Nurdin	0,50	
A23	Ruddin	0,50	
A24	Pujawan Sari	0,50	
A25	Dijji	0,25	
A26	Imam Musoli	1,00	
A27	Sukirman	1,00	
A28	Riono	1,00	
A29	Imam Sukadi	1,00	
A30	Ritman	1,00	
A31	Muhajir	1,00	
A32	Hasan	1,00	
A33	Yusuf	1,00	
A34	Samuri	1,00	
A35	Hadi Prayitno	1,00	
A36	Ketut Nadi	1,00	
A37	Caturiono	1,00	
A38	Rustam	1,00	
A39	Japar	1,00	
A40	Lanco	1,00	
A41	M. Taufik	1,00	
A42	Sunata Yasa	1,00	
A43	Karim	1,00	
A44	Mail	1,00	
A45	Kristiono	1,00	
		40,00	

KOMUNIKASI

NO	PERTANYAAN NOMOR :	JAWABAN PILIHAN			RESPONDEN	ARTI JAWABAN
		a	b	c		
1.	Apakah ada sosialisasi tentang program pengembangan tanaman jeruk siem	45			A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45	a= Pernah
2.	Apakah sering dilakukan pertemuan (interaksi) petani dan petugas/ penyuluh tentang program pengembangan jeruk siem	37			A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A42 A43 A44 A45 A34 A36 A38 A39 A41 A35 A37 A40	a=Sering b= Kadang kadang c= Tidak Pernah
3.	Apakah petugas/aparat desa sering melakukan komunikasi dengan petani tentang kegiatan program pengembangan jeruk siem ?	38			A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A31 A32 A33 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A3 A23 A34 A37 A11 A15 A30	a=Sering b= Kadang-kadang c=Tidak pernah
4.	Apakah bapak/ibu memahami/ mengerti kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya	32			A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A24 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A23 A34 A37 A44 A11 A9 A13 A17 A27 A33 A15 A30	a=Mengerti b=Kurang Mengerti c= Tidak Mengerti
5.	Apakah bapak/ibu dapat menerima kebijakan pengembangan jeruk siem di Desa Lambodi Jaya	36			A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A24 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A33 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A23 A27 A34 A37 A44 A11 A15 A30	a=Diterima b=Kurang diterima c=Tidak diterima
6.	Apakah aparat desa/kecamatan/ petugas telah melakukan penyuluhan pengembangan jeruk siem di desa lambodi jaya	32			A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A24 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A23 A27 A33 A44 A11 A15 A30 A34 A37	a=Dilakukan b= Kurang dilakukan c=Tidak dilakukan
1	SUMBERDAYA Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan petugas lapangan dalam menyampaikan kebijakan pengemb jeruk siem	35			A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A33 A37 A44 A11 A15 A30	a= Mampu b= Kurang Mampu c=Tidak Mampu

NO	PERTANYAAN NOMOR :	JAWABAN PILIHAN			RESPONDEN	ARTI JAWABAN
		a	b	c		
2	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan sumberdaya petugas dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan rencana yang sudah disusun	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Mampu
		34			A3 A9 A13 A17 A33 A37 A44	b= Kurang Mampu
			7		A11 A15 A30 A34	c= Tidak Mampu
3	Bagaimana tanggapan anda tentang kemampuan petugas lapangan/aparat yang terlibat	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Mampu
		35			A3 A9 A13 A17 A33 A37 A44	b= Kurang Mampu
			7		A11 A15 A30	c= Tidak Mampu
4	Bagaimana tanggapan anda mengenai kemampuan petugas lapangan dan aparat yang terlibat dalam mewujudkan sikap kebersamaan antara petani dalam implementasi program pengemb jeruk siem	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Mampu
		35			A3 A9 A13 A17 A30 A33 A37 A44	b= Kurang Mampu
			5		A11 A15	c= Tidak Mampu
1	SIKAP PELAKSANA Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan jeruk siem di desa lambodijaya	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Baik
		34			A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44	b= Kurang Baik
			8		A11 A15 A30	c= Tidak Baik
2	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap ramah petugas dalam memberikan pelayanan	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A16 A16 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A28 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Ramah
		29			A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44 A14 A19 A24	b= Kurang Ramah
			11		A11 A15 A30 A29 A34	c= Tidak Ramah
3	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap pelaksana/petugas dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A16 A18 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A28 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Baik
		29			A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44 A14 A19 A24	b= Kurang Baik
			11		A11 A15 A30 A29 A34	c= Tidak Baik
4	Bagaimana tanggapan anda mengenai sikap transparansi pelaksana dalam menjalankan kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Transparan
		32			A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37	b= Kuang Transparan
			7		A11 A15 A30 A23 A24 A44	c= Tidak Transparan
1	TATA ALIRAN//STRUKTUR BIROKRASI Bagaimana tanggapan anda mengenai kemudahan dalam mengurus kebutuhan dalam implementasi kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45	a= Mudah
		32			A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37	b= Kurang Mudah
			7		A11 A15 A30 A23 A24 A44	c= Tidak Mudah

NO	PERTANYAAN NOMOR :	JAWABAN PILIHAN			RESPONDEN	ARTI JAWABAN
		a	b	c		
1	FAKTOR PENEKAN/PENGHAMBAT Bagaimana tanggapan anda dengan adanya program pengemb. Jeruk siem ;apakah jumlah pelaku yang terlibat dalam program tersebut :	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A16 A18 A20 A21 A22 A23 A25 A26 A28 A31 A32 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44 A14 A19 A24 A29 A34 A11 A15 A30	a= Banyak b= Kurang Banyak c= Tidak banyak
		29	13	3		
2	Apakah anda percaya program ini akan berhasil	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A20 A25 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A32 A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44 A14 A19 A24 A29 A34 A16 A18 A11 A15 A30 A21 A22 A23 A26 A28 A31	a= Percaya b=Kurang Percaya c= Tidak Percaya
		21	15	9		
3	Apakah ada mitra dari instansi lain yang ber hubungan dengan pengembangan jeruk	a	b	c	A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A11 A15 A30 A23 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A24 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45	a= Ada b= Tidak Ada
		11	34			
4	Dalam pelaksanaan program ini apakah tidak selalu mengalami keterlambatan penanganan di lapangan	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A20 A25 A32 A35 A38 A39 A40 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A44 A14 A19 A24 A11 A15 A30 A29 A34 A16 A18 A21 A23 A26 A28 A31 A22 A36 A41	a= Sering terlambat b= Tepat Waktu c= Terlambat
		19	11	15		
1	FAKTOR PENDORONG Bagaimana tanggapan anda tentang dukungan pimpinan mulai dari Dinas sampai ke Ketua Kelompok	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A11 A15 A30 A23 A24 A44	a= Mendukung b= Kurang Mendukung c= Tidak Mendukung
		39	6	0		
2	Dengan adanya program ini apakah komitmen pelaksana sudah baik untuk mewujudkan implementasi pengemb. Jeruk siem	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A3 A9 A13 A17 A27 A33 A37 A11 A15 A30 A44 A23 A24	a= Baik b= Kurang Baik c= Tidak Baik
		39	4	2		
3	Bagaimana tanggapan anda tentang kemam- puan instansi pelaksana dalam mengimplemen- tasikan kebijakan pengembangan jeruk siem	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A33 A11 A15 A30 A44 A3 A9 A13 A17 A27 A23 A24 A37	a= Mampu b= Kurang Mampu c= Tidak mampu
		33	9	3		
4	Dengan program ini, menurut saudara apakah secara umum dapat menerima	a	b	c	A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 A16 A18 A19 A20 A21 A22 A25 A26 A28 A29 A31 A32 A34 A35 A36 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A45 A33 A3 A9 A11 A13 A15 A17 A27 A30 A37 A44 A23 A24	a= Menerima b= Kurang menerima c= Tidak Menerima
		33	10	2		



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 247 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BPLM KEGIATAN PENGEMBANGAN JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005, maka perlu menetapkan lokasi dan kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Konawe Selatan;
 - bahwa lokasi dan kelompok tani penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 174.0/18-04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;

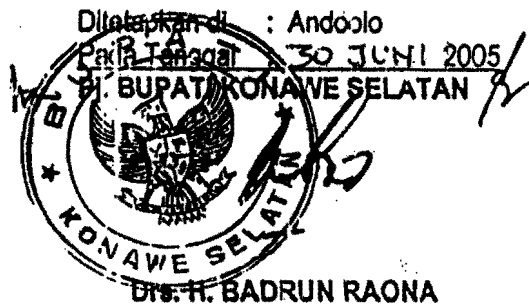
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan lokasi dan kelompok tani penerima bantuan pada kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Siam Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

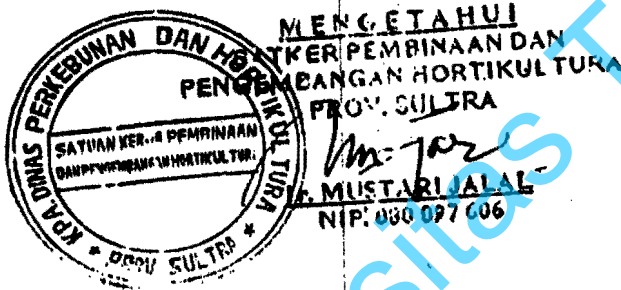
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Pembinaan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
 Nomor : 247 Tahun 2005
 Tanggal : 30 JUNI 2005

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BPLM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JERUK SIAM KABUPATEN
 KONAWE SELATAN PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005**

No.	Kecamatan	Desa/Kel. Tani	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1.	Tinanggea	a. Desa Lambodi Jaya		
		- Mekar Sari	20	
		- Harapan Jaya	20	
		b. Desa Roraya		
		- Morini	20	
2.	Konda	a. Desa Mata Wolasi		
		- Andi Bura	20	
JUMLAH			80	



MENGETAHUI
 KEPALA SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA
 L. MUSTARJALAL
 NIP. 080 097 606



Drs. H. BADRUN RAONA



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2005

BUPATI KONAWE SELATAN


- Menimbang** :
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu mengangkat Tim Teknis Tingkat Kabupaten.
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan**: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 174.0/18-04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Teknis dan Pembantu Tim Teknis pada kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Siam Kabupaten Konawe Selatan, Tahun Anggaran 2005;
- Kedua** : Tugas Tim Teknis Kabupaten :
- Menetapkan lokasi kegiatan
 - Menetapkan persyaratan teknis komoditi yang akan di sahakan oleh petani melalui Dana BPLM.
 - Melakukan verifikasi kelayakan RKK yang diajukan kelompok tani untuk memperoleh dana BPLM.
 - Melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala.

Keliga : Semua biaya yang timbul akibat tertibnya Keputusan ini dibebankan pada Satuan 040677.pdf Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005.


Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Andoolo
Pada Tanggal : 25 JUNI 2005
PI. BUPATI KONAWE SELATAN

Drs. H. BADRUN RAONA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.



MENGETAHUI
SATKER PEMERINTAH DAN
PANGKOPKAM HORTIKULTURA
PROV. SULTRA

I. MUSTARI JALAL
NIP. 080 097 506

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
 Nomor : 238 Tahun 2005
 Tanggal : 29 JUNI 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS DAN PEMBANTU TIM TEKNIS
 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM TEKNIS
1.	Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan	Ketua
2.	NAIM, A.Md.	Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wakil Ketua
3.	Ir. AGUSSALIM, M.Si.	Kabid. Ekososbud Rappeda Kab. Konse	Anggota
4.	DJIDI, A.Md.	K P K Tinanggea	Anggota
5.	SAJI, A.Md.	PPL Desa Lambodi Jaya	Anggota
6.	WARDIANA, SP.	K P K Konda	Anggota



MENGETAHUI
 KEPALA BAKOR PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA
 DR. H. MUSTARIJALAL
 NIP. 080 097 606



DR. H. BADRUN RAONA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 36/KPA/X/2005

*Antara***PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PERIKATAN
SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA. 2005***Dengan***KELOMPOK TANI MEKAR SARI***Tentang***PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu Lima bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, jalan Pertanian No. 1 Kendari, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. Mustari Jalal : Pejabat Pembuat Komitmen/Perikatan (PPK) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. DIPA Tahun 2005 No. 174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005 yang berkedudukan di jalan Pertanian No. 1 Kendari yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Choiru Najib : Ketua Kelompok Tani Mekar Sari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Mekar Sari, yang berkedudukan di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggen, Kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2004 Departemen Pertanian;
3. DIPA Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;
4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 475/KU.200/A/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Kelompok kepada Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2005;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan No : SE 82/PB/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Penguatan Modal Kelompok kepada Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian tahun anggaran 2005.
6. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 247 Tahun 2005 Tanggal 30 Juni 2005 Tentang Penetapan Kelompok Sasaran.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal tersebut sesuai dengan Rencana usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana penguatan modal yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penguatan Modal dimaksud pada pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kendari, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Tani Mekar Sari, Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Unit Tinanggea, Nomor Rekening 33 - 21 - 7089

Pasal 5
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal sesuai dengan pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA**, berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Surat Perjanjian kerjasama ini maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Kendari, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Bagian Proyek dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
P E N U T U P

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab turpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok,
Tani Mekar Sari


CHOIRU NAJIB



PIHAK PERTAMA

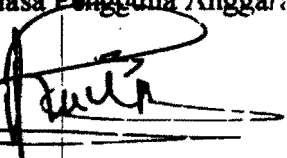
Kejabat Pembuat Komitmen/Perikatan
Kombinasi dan Pengembangan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara,


IR. MUSTARI JALAL
NIP. 030 097 606

Mengetahui :

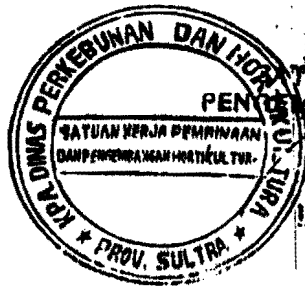
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara/
Kuasa Pengguna Anggaran




DANIEL J. BUNGGULAWA
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 080 055 155


BANK RAKYAT INDONESIA
**KANCA BENDUARI
SUB AREA MIKRO KANGGEA**
URI UNIT
No. Rekening 33-21-7000
Tgl. : 26-08-2005
Nama KELOMPOK TANI MEKAR SART
Alamat : DESA LAMBODI JAYA KEC.TNG
Tanda Pengenal : KTP :
/SIM/PASPOR :

Tgl	Sandi	Mutasi		Saldo	Pengesahan Teller
		Debet	Kredit		
26-08-2005	1		20.000	20.000	737 A


**MENGETAHUI
KERPEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROV. SULTRA**
**M. MUSTARIJALIL
NIP: 080 097 606**

1. Penyusunan
2. Pengambilan
3. Pemindah bukuan ke Jk

4. Pemindah bukuan debit
5. Bangun
6.

7. Koreksi
8. Pemindahan ke Jk

SMP - 03

**DAFTAR ; RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KELOMPOK TANI
PENERIMA DANA Penguatan MODAL BAITUAN PINJAMAN
LANGSUNG MASYARAKAT (BPLM)
SATKER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA. 2005**

040677.pdf

Provinsi : Sulawesi Tenggara Narna Klp Tani : Mekar Sari
Kabupaten : Konawe Selatan Jumlah Anggota : 25 Orang
Kecamatan : Tinanggea Jenis Usaha : Budidaya Jeruk Siam
Desa : Lambodi Jaya Volume Usaha : 20 Ha

lc	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Pembuatan Lubang	8,000 Lbng	750	6,000,000	
2	Bibit	8,000 Phn	3,500	28,000,000	
3	Urea	2,000 Kg	1,200	2,400,000	
4	SP 36	1,000 Kg	1,500	1,500,000	
5	KCL	1,000 Kg	2,800	2,800,000	
6	Herbisida	80 Ltr	41,250	3,300,000	
7	Furadan	80 Kg	12,500	1,000,000	
				45,000,000	

KELOMPOK TANI MEKAR SARI

Ketua Kelompok Tani


CHOIRU NAJIB

Sekretaris


FAKHIRIDIN

Bendahara


AGUNG. D

Mengetahui :
Ketua Tim Tennis


Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si
NIP. 010 082 564

kelompok Tani : Mekar Sari
 Desa : Lambodi Jaya
 Kecamatan : Tinanggea
 Kabupaten : Konawe Selatan
 Provinsi : Sulawesi Tenggara

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Kepada Yth.
 Kuasa Penggunaan Anggaran
 Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
 Provinsi Sulawesi Tenggara
 Di

Tempat

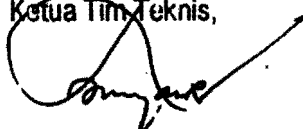
Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No 247 tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra di Kabupaten Konawe Selatan, dengan ini kami mengajukan permohonan dari penguatan modal kelompok sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Bibit	28.000.000,-
2	Pembuatan Lubang	6.000.000,-
3	Pengadaan Pupuk :	
	☛ Urea	2.400.000,-
	☛ SP 36	1.500.000,-
	☛ KCL	2.800.000,-
4	Pengadaan Herbisida	3.380.000,-
5	Pengadaan Furadan	1.000.000.
	Jumlah	45.000.000

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 36/KPA/X/2005 Tanggal 18 Oktober 2005, Dana Penguatan Modal tersebut agar dipindahbukukan ke rekening Kelompok Mekar Sari No. Rekening 33 - 21 - 7089 Cabang/Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Pembantu Tinanggea

Tinanggea, 18 Oktober 2005

Menyetujui :
 Ketua Tim Teknis,



Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si
 NIP. 010 082 564

Ketua Kelompok Tani Mekar Sari



CHOIRU NAJIB

Mengetahui / Menyetujui,
 Pejabat Pembuat Komitmen/Perikatan
 Satuan Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
 Provinsi Sulawesi Tenggara



NPWP :
MAK :
T.A. : 2005

KWITANSI

dah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. T.A. 2005

nyaknya Uang : **Empat Puluh Lima Juta Rupiah**

itik Pembayaran : Dana Penguatam Modal Kelompok Mekar Sari
Di Desa Lambodi Jaya .Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 36/KP/IX/2005 Tanggal 18 Oktober 2005

rbilang Rp. : **45.000.000**

Mengetahui/Menyetujui :
Ketua Tim Tehnis,

Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si
NIP. 010 082 564

. Tinanggea, 18 Oktober 2005
Yang Menerima uang
Ketua Kelompok Tani Mekar Sari

CHOIRU NAJIB

SETUJU DIBAYAR :

ATAS KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
SATKER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
HORTIKULTURA PROV. SULTRA,

Ir. MUSTARI JALAL
NIP. 080 097 606

LUNAS DIBAYAR/DITERUSKAN
KE KPPN Tanggal ...23...1...1.05
BENDAHARA PENGELUARAN,

H. DJASRAN
NIP.080 049 677

**DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Pertanian No. 1 Telepon 0401-321953 Fax. 0401-322182 Kendari 93111

Departemen Pertanian : Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara
Tugas Pokok dan Fungsi : Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra
Tahun Anggaran 2005

SURAT PERNYATAAN KPA

Nomor : 900/90/DISBUN/X/2005

Sehubungan dengan SPP-LS yang kami ajukan ke KPPN Kendari untuk dapat direalisasikan Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra T.A. 2005 sebesar Rp. 720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), maka dengan ini kami buat Daftar Nama Penerima Kelompok Sasaran sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian RI No. 475/KU.200/A/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perencanaan dan Penganggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE.82/PB/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 sebagai berikut :

No	Nama / Alamat	Jabatan	Nomor dan Tgl Surat Perjanjian Kerja Sama	No. Rekening Kelompok	Jumlah (Rp.)
1.	Ir. Yunarwati Kel. Bende	Ketua Klp. Tani Wulele Sanggula	33/KPA/X/2005 Tgl 17 Okt 2005	0646.01.004874.50.8 BRI Unit Wua-wua	80.000.000
2.	H. Muh. Yasin Usman Kota Kendari	Ketua Klp. Tani Kuha Cabe Merah	34/KPA/X/2005 Tgl 17 Okt 2005	0192.01.030766.50.0 BRI Cab. Kendari	100.000.000
3.	Imam Musoli Desa Lambodi Jaya	Ketua Klp. Tani Harapan Jaya	35/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7090 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
4.	Choiru Najib Desa Lambodi Jaya	Ketua Klp. Tani Mekar Sari	36/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7089 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
5.	Sanapa Desa Mata Wolasi	Ketua Klp. Tani Andibura	37/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	0646.01.000213.53.0 BRI Unit Wua-wua	45.000.000
6.	Jamaluddin Desa Roraya	Ketua Klp. Tani Morini	38/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7094 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
7.	Saleh Rahman Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Siporenu	39/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0216.01.010031.50.3 BRI Cab. Kolaka	84.000.000
8.	Y. Toding Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Sejahtera	40/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0216.01.010086.50.8 BRI Cab. Kolaka	48.000.000
9.	Semmang Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Suka Maju	41/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0216.01.010085.50.2 BRI Cab. Kolaka	48.000.000

2	3	4		
Syarifuddin Desa Lakalamba	Ketua Klp. Tani Kembang Sari	42/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	8976401-0 BNI Raha	45.000.000
La Ode Sale Desa Lombu Jaya	Ketua Klp. Tani Subur Jaya	43/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	9037251-8 BNI Raha	45.000.000
M. Y a d i Desa Katangana	Ketua Klp. Tani Sanggar Produksi	44/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	168.003085253.901 BNI Raha	45.000.000
Muh. Sapon Desa Kasimpa Jaya	Ketua Klp. Tani Jaya Mukti	45/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	168.003085261.901 BNI Raha	45.000.000
Jumlah				720.000.600

nikian Surat Pernyataan ini di buat untuk melengkapi Pengajuan S P-P-LS Satuan Kerja Pembinaan dan
gembangan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2005.

Kendari, 21 Oktober 2005

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara/
Kasubid. Bina Pengguna Anggaran,



H. DANIEL J. BUNGGUJAWA
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 080 055 155

MENGETAHUI
SATKER PEMBINAAN DAN
GEMBANGAN HORTIKULTURA
PROV. SULTRA



I. MUSTARIJALAI
NIP. 080 097 606



BUPATI KONAWE SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 247/TAHUN 2005**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BPLM
KEGIATAN PENGEMBANGAN JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN
PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI KONAWE SELATAN

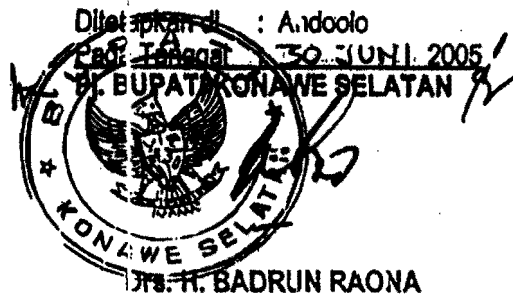
- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005, maka perlu menetapkan lokasi dan kelompok tani penerima bantuan di Kabupaten Konawe Selatan.
 - bahwa lokasi dan kelompok tani penerima bantuan yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan kegiatan dimaksud.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah;
 - Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Perhatikan:** Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 174.0/18-04.1/X.V/2005 tanggal 1 Januari 2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

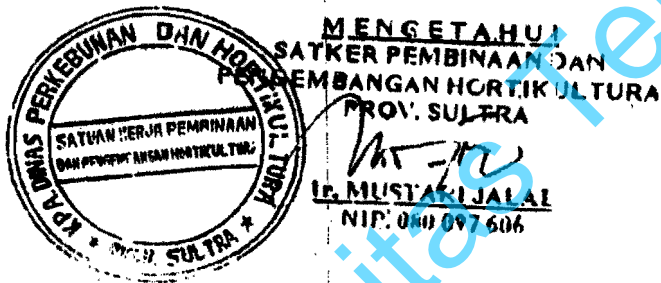
- Pertama** : Menetapkan lokasi dan kelompok tani penerima bantuan pada kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Siam Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Pembinaan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

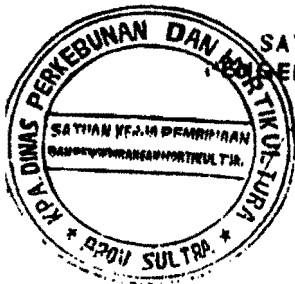
1. Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Adoolo;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.



Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
 Nomor : 247 Tahun 2005
 Tanggal : 30 JUNI 2005

**PENETAPAN LOKASI PENERIMA BPLM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JERUK SIAM KABUPATEN
 KONAWE SELATAN PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2005**

No.	Kecamatan	Desa/Kel. Tani	Luas Lahan (Ha)	Keterangan
1.	Tinanggea	a. Desa Lambodi Jaya		
		- Mekar Sari	20	
		- Harapan Jaya	20	
		b. Desa Koraya		
		- Morini	20	
2.	Konda	a. Desa Mata Wolasi		
		- Andi Bura	20	
JUMLAH			80	



MENGETAHUI
 SATKER PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA

Ir. MUSTARI JALAL
 NIP. 080 097 606



Ir. H. BADRUN RAONA



BUPATI KONAWE SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN PADA SATUAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2005

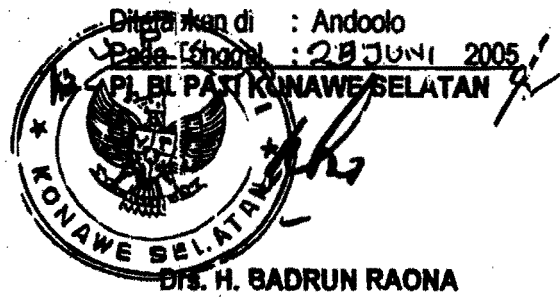
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005, dipandang perlu mengangkat Tim Teknis Tingkat Kabupaten.
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam ampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan cakap sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Sistem Budi Jaya Tanaman,
 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah;
 2. Undang-Undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan**: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 174.0.18-04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Tim Teknis dan Pembantu Tim Teknis pada kegiatan Pengembangan Agribisnis Jeruk Siam Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2005;
- Kedua** : Tugas Tim Teknis Kabupaten :
1. Menetapkan lokasi kegiatan
 2. Menetapkan persyaratan teknis komoditi yang akan diusahakan oleh petani melalui dana BPLM.
 3. Melakukan verifikasi kelayakan RIK yang diajukan kelompok tani untuk memperoleh dana BPLM.
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala.

- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Satuan Pembinaan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2005.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan Diampaihan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendar;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.



MENGETAHUI
 SATKER PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA

[Signature]
 Ir. MUSTAKIJALAI
 NIP. 080 097 606

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
 Nomor : 238 Tahun 2005
 Tanggal : 29 JUNI 2005

**SUSUNAN TIM TEKNIS DAN PEMBANTU TIM TEKNIS
 PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JERUK SIAM KABUPATEN KONAWE SELATAN**

No.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM TEKNIS
1.	Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Konawe Selatan	Ketur
2.	NAIM, A.Md.	Kabid. Tanaman Pangan dan Hortikultura	Wakil Ketua
3.	Ir. AGUSSALIM, M.Si.	Kabid. Ekososbud Bappeda Kab. Konawe	Anggota
4.	DJIDI, A.Md.	KPK Tinanggea	Anggota
5.	SAJI, A.Md.	PPL Desa Lambodi Jaya	Anggota
6.	WARDIANA, SP.	KPK Konda	Anggota



MENGETAHUI
 SEKRETARIS PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA
 G. MUSTARI JALAL
 NIP. 080 097 606



Drs. H. BADRUN RAONA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 35/KPA/X/2005

Antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN/PERIKATAN
SATUAN KERJA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA. 2005**

*Dengan***KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA***Tentang***PEMANFAATAN DANA PENGUATAN MODAL USAHA KELOMPOK**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan Oktober tahun dua ribu Lima bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, jalan Pertanian. No. 1 Kendari, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Ir. Mustari Jalal** : Pejabat Pembuat Komitmen/Perikatan (PPK) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. DIPA Tahun 2005 No. 174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005 yang berkedudukan di jalan Pertanian No. 1 Kendari yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Imam Musoli** : Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Harapan Jaya, yang berkedudukan di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha kelompok, dengan ketentuan sebagai berikut :

Fasal 1**DASAR PELAKSANAAN**

1. Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun Anggaran 2004 Departemen Pertanian;
3. DIPA Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;
4. Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 475/KU.2004/A/7/2005 tanggal 29 Juli 2005 tentang Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Kelompok kepada Kelompok Sasaran Tahun Anggaran 2005;
5. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perberdaharaan No : SE 82/PB/2005 tanggal 31 Agustus 2005 tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Penguatan Modal Kelompok kepada Sasaran pada kegiatan Pembangunan Pertanian tahun anggaran 2005.
6. Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan, Nomor 247 Tahun 2005 Tanggal 30 Juni 2005 Tentang Pembinaan Kelompok Sasaran

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana penguatan modal tersebut sesuai dengan Rencana usaha Kelompok (dirinci sesuai dengan bidang usaha kelompok masing-masing sebagaimana terlampir).

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana penguatan modal yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 174.0/18.04.1/XXV/2005 tanggal 1 Januari 2005;
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar **Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Penguatan Modal dimaksud pada pasal ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kendari, dengan cara pembayaran langsung ke rekening Kelompok Tani Harapan Jaya, Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Unit Tinanggea Nomor Rekening : 33 - 21 - 7090

Pasal 5
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal sesuai dengan pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA**, berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Fasal 6
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Surat Perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Kendari, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal 7
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada Pemimpin Bagian Proyek dengan tembusan kepada Tim Teknis dalam waktu 4 x 24 jam kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah :
 - a. Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Surat perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok,
MATERAI dan Jaya
TUMPEL
Tgl. 20
6000
IMAM MUSOLI



PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen/Perikatan
Kantor Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara,
Ir. MUSTARIJALAL
NIP. 080 097 606

Mengetahui :

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara/
Kuasa Pengguna Anggaran
Ir. DANIEL J. BUNGGULAWA
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 080 055 155


BANK RAKYAT INDONESIA

 KANCA BRT
 SUKSES KENDARI
 SUKSES TULANGGEEA

BRI UNIT

No. Rekening... 33-21-7000

Tgl. 26-08-2005

Nama KLP TAKI HARAPAN JAYA

Alamat DESA LANBGOI JAYA KEC. TNG

Tanda Pengenal : KTP :

/SIM/PASPOR :

Tgl	Sandi	Mutasi		Saldo	Pengesahan Teller
		Debet	Kredit		
26-08-2005	1		20.000	20.000	7567


 MENGETAHUI
 SATKER PEMBINAAN D/N
 PEMBANGUNAN HORTIKULTURA
 PROV. SULTRA

 Ir. MUSTARJALAL
 NIP. 080 097 606

Universitas Terbuka

Kelompok Tani : Harapan Jaya
 Desa : Lambodi Jaya
 Kecamatan : Tinanggea
 Kabupaten : Konawe Selatan
 Provinsi : Sulawesi Tenggara

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

Kepada Yth.
 Kuasa Penggunaan Anggaran
 Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
 Provinsi Sulawesi Tenggara
 Di

Tempat

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan No 247 tahun 2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra di Kabupaten Konawe Selatan, dengan ini kami mengajukan permohonan dana penguatan modal kelompok sebesar **Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah)** sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah (Rp.)
1	Pengadaan Bibit	28.000.000,-
2	Pembuatan Lubang	6.000.000,-
3	Pengadaan Pupuk :	
	☛ Urea	2.400.000,-
	☛ SP 36	1.500.000,-
	☛ KCL	2.800.000,-
4	Pengadaan Herbisida	3.300.000,-
5	Pengadaan Furadan	1.000.000,-
	Jumlah	45.000.000

lanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor /KPA/X/2005 Tanggal 18 Oktober 2005, Dana Penguatan Modal tersebut agar dipindahkan ke rekening kelompok Tani Harapan Jaya No. Rekening 33 - 21 - 7090 Cabang/Unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang mbantu Tinanggea

Tinanggea, 18 Oktober 2005
 Ketua Kelompok Tani Harapan Jaya

Menyetujui :
 Ketua Tim Teknis,


Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si
 NIP. 010 082 564


IMAM MUSOLI

Mengetahui / Menyetujui,
 Pejabat Pembuat Komitmen/Perwakilan
 Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
 Provinsi Sulawesi Tenggara

**DAFTAR ; RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) KELOMPOK TANI
PENERIMA DANA PenguATAN MODAL BANTUAN PINJAMAN
LANGSUNG MASYARAKAT (BPLM)
SATKER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TA. 2005**

040677.pdf

Provinsi ; Sulawesi Tenggara Nama Klp Tani ; Harapan Jaya
Kabupaten ; Konawe Selatan Jumlah Anggota ; 20 Orang
Kecamatan ; Tinanggea Jenis Usaha ; Budidaya Jerul: Siam
Desa ; Lambodi Jaya Volume Usaha ; 20 Ha

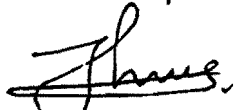
No	Jenis Kebutuhan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)	Ket
1	Pembuatan Lubang	8,000 Lbng	750	6,000,000	
2	Bibit	8,000 Phn	3,500	28,000,000	
3	Urea	2,000 Kg	1,200	2,400,000	
4	SP 36	1,000 Kg	1,500	1,500,000	
5	KCL	1,000 Kg	2,800	2,800,000	
6	Herbisida	80 Ltr	41,250	3,300,000	
7	Furadan	80 Kg	12,500	1,000,000	
				45,000,000	

KELOMPOK TANI HARAPAN JAYA

Ketua Kelompok Tani

Sekretaris

Bendahara


IMAM MUSOLI


SUKIRMAN


MUHAJIR

Mengstahui :
Ketua Tim Tehnis


Drs. TAMZAN RENGGAALA, M.Si
NIP. 010 082 564

NPWP :
 MAK :
 T A. : 2005

KWITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara. T A. 2005

Banyaknya Uang : **Empat Puluh Lima Juta Rupiah**

Jntuk Pembayaran : Dana Penguatam Modal Kelompok Harapan Jaya.
 Di Desa Lambodi Jaya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan.
 Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. 35/KP 4/X/2005 Tanggal 18 Oktober 2005

Terbilang Rp. : **45.000.000**

Mengetahui/Menyetujui :
 Ketua Tim Tehnis,

Drs. TAMZAN RENCGAALA, M.S.
 NIP. 010 082 564

Tinanggea, 18 Oktober 2005
 Yang Menerima uang
 Kelompok Harapan Jaya

IMAM MUSOLI

SETUJU DIBAYAR :
 An. KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 SATKER PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
 HORTIKULTURA PROV. SULTRA,



MUSTARI JALAL
 NIP. 080 097 606

LUNAS DIBAYAR/DITERUSKAN
 KE KPPN Tanggal ... 23...11.05
 BEINDAHARA PENGELUARAN,

H. DJASRAN
 NIP.080 049 677



DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Pertanian No. 1 Telepon 0401-321953 Fax. 0401-322182 Kendari 93111

Departemen Pertanian : Pertanian
Unit Organisasi : Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara
Tugas Pokok dan Fungsi : Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra
Tahun Anggaran 2005

SURAT PERNYATAAN KPA

Nomor : 900/90/DISBUN/X/2005

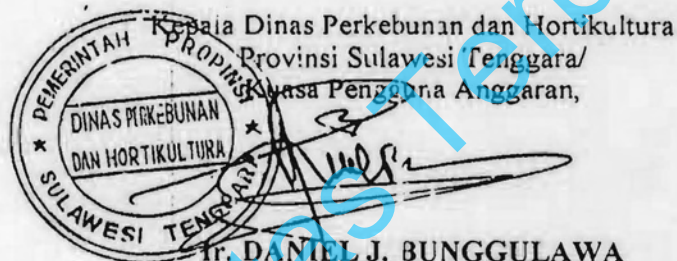
Sehubungan dengan SPP-LS yang kami ajukan ke KPPN Kendari untuk dapat direalisasikan Pencairan Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sultra TA. 2005 sebesar Rp. 720.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta rupiah), maka dengan ini kami buat Daftar Nama Penerima Kelompok Sasaran sesuai Surat Edaran Menteri Pertanian RI No. 475/KU.200/A/7/2005 Tanggal 29 Juli 2005 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perencanaan Departemen Keuangan RI Nomor : SE.82/PB/2005 Tanggal 31 Agustus 2005 sebagai berikut :

No	Nama / Alamat	Jabatan	Nomor dan Tgl Surat Perjanjian Kerja Sama	No. Rekening Kelompok	Jumlah (Rp.)
2	3	4	5	6	
	Ir. Yunarwati Kel. Bende	Ketua Klp. Tani Wulele Sanggula	33/KPA/X/2005 Tgl 17 Okt 2005	0646.01.004874.50.8 BRI Unit Wua-wua	80.000.000
	H. Muh. Yasin Usman Kota Kendari	Ketua Klp. Tani Kuba Cabe Merah	34/KPA/X/2005 Tgl 17 Okt 2005	0192.01.036766.50.0 BRI Cab. Kendari	100.000.000
	Imam Musoll Desa Lambodi Jaya	Ketua Klp. Tani Harapan Jaya	35/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7090 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
	Choiru Najib Desa Lambodi Jaya	Ketua Klp. Tani Mekar Sari	36/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7089 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
	Sanapa Desa Mata Wolasi	Ketua Klp. Tani Andibura	37/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	0646.01.000213.53.0 BRI Unit Wua-wua	45.000.000
	Jamaluddin Desa Roraya	Ketua Klp. Tani Morini	38/KPA/X/2005 Tgl 18 Okt 2005	33-21-7094 BRI Unit Tinanggea	45.000.000
	Saleh Rahman Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Siporennu	39/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0216.01.010031.50.3 BRI Cab. Kolaka	84.000.000
	Y. Toding Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Sejahtera	40/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0216.01.010086.50.8 BRI Cab. Kolaka	48.000.000
	Semmang Desa Lamedai	Ketua Klp. Tani Suka Maju	41/KPA/X/2005 Tgl 19 Okt 2005	0215.01.010085.50.2 BRI Cab. Kolaka	48.000.000

1	2	3	4	5	6
1.	Syarifuddin Desa Lakalamba	Ketua Klp. Tani Kembang Sari	42/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	8976401-0 BNI Raha	45.000.000
1.	La Ode Sale Desa Lumbu Jaya	Ketua Klp. Tani Sibur Jaya	43/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	9037251-8 BNI Raha	45.000.000
2.	M. Y a d i Desa Katangana	Ketua Klp. Tani Sanggar Produksi	44/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	168.003085253.901 BNI Raha	45.000.000
1.	Muh. Sapon Desa Kasimpa Jaya	Ketua Klp. Tani Jaya Mukti	45/KPA/X/2005 Tgl 20 Okt 2005	168.003085261.901 BNI Raha	45.000.000
Jumlah					720.000.000

mikian Surat Pernyataan ini di buat untuk melengkapi Pengajuan SIP-P-LS Satuan Kerja Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura Prov. Sulawesi Tenggara TA. 2005.

Kendari, 21 Oktober 2005



Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara/
Korwilasa Pengelola Anggaran,
Ir. DANIEL J. BUNGGULAWA
Pembina Tk. I Gol. IV/b
NIP. 080 055 155



MENGETAHUI
SATKER PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
PROV. SULTRA

Ir. MUSTARI JALAL
NIP. 080 097 606

NOTULEN UJIAN SIDANG TAPM MAPU 5400

19 Mei 2011

Nama/NIM : M. Rifai Gunawas/015227512
Tempat : R. Sidang UPBJJ-UT Kendari
Pukul : 13.27 WIT – 15.27 WIT

Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Jeruk Siem dalam Peningkatan Produksi Jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan

Ketua Komisi : Drs. Wawan Ruswanto, M.Si
Sekretaris Komisi : Santi Dewiki, M.Kes
Pembimbing I : Prof. Dr. La Ode Harafah, SE.
Pembimbing II : Prof. Dr. Wempy Banga
Penguji Ahli : M. Qudrat Nugraha, Ph.D

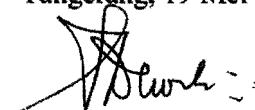
Presentasi : 15 Menit

No.	Diskusi/Pertanyaan	Jawaban
1.	M. Qudrat Nugraha, Ph.D Apa permasalahan penelitian Bapak	Rumusan masalahnya adalah bagaimana Pengembangan Jeruk Siem dalam Peningkatan Produksi Jeruk di Desa Lambodi Jaya Kecamatan
	Apa latar belakangnya	Belum diketahui apakah peningkatan tsb krn kebijakan yang ada?
	Jadi Bapak melihat peningkatan ini suatu masalah.	Iya.
	Menurut perkiraan Bapak mengapa ini mengalami kenaikan yg signifikan	Krn adanya pola bantuan langsung pada masyarakat. Apakah implementasi ini baik atau tidak, ternyata peserta menyatakan cukup.
	Kenapa data 2007 tidak ditampilkan Data tahun 2007 dan 2008 harus ditampilkan. jangan-jangan turun lagi. Bapak beritakan sampai 2008 karena penelitian berlangsung di tahun 2008.	Krn penelitian ini dilakukan pada tahun 2008, hanya data 2004 dan 2006 saja yang dilihat.
	Kalau dilihat judulnya apakah Kata Jeruk sama tidak? Judul dietnsisikan, cari ahli bahasa.	Sama
	Mengapa harus jeruk Pak? Bapak yang sampaikan tadi di tesis ada di halaman berapa? Alasan mengapa memilih jeruk harus dimasukkan ke dalam latar belakang.	Kualitas unggulan nasional ada beragam buah. Di Sultra adalah jeruk. Dari tiga tempat kami memilih sulsel, maka saya memilih jeruk. Kesesuaian lahan

No.	Diskusi/Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Halaman 46, kerangka berpikir yang dibuat apakah buatan sendiri atau ambil dari referensi?</p> <p>Kalau diadaptasi dari yang lain mohon dituliskan sumbernya.</p> <p>Garis-garis apakah ada artinya? Jika tidak ada ya dihapus saja.</p>	<p>Ada dalam pikiran saya dan ada dalam teori yang saya baca. Skema ini dibuat sendiri, baik factor pendorong atau pendukung. Misalnya, banyaknya pelaku, loyalitas ganda didukung oleh tulisan-tulisan orang lain.</p> <p>Faktor pendorong ada dalam teori lain. misalnya kemampuan pelaksana tidak ditampilkan, tetapi pada saat pembuatan proposal ini, pembawa program hal tsb sangat menentukan.</p>
	<p>Populasi itu siapa?</p> <p>Cara pengambilan sampelnya bagaimana?</p> <p>Adakah profil; populasi penelitiannya? Di mana?</p> <p>Profilnya harus dibuat pada saat pertama kali pembahasan. Adakah?</p>	<p>Pengambil kesejahteraan sosial Seluruh populasi diambil Karena jmi sbb diketahui pada saat survey pendahuluan. Ada, kami lampirkan dalam bentuk SK. Ada Pak.</p>
	<p>Waktu mengambil data, menggunakan apa?</p> <p>Ada Pedoman Wanwancaranya? Bapak membuat Pedoman wawancara tidak?</p> <p>Pedoman wawancara tidak terstruktur</p>	<p>Kuesioner dan langsung wawancara. Ada. Tidak Pak Secara eksplisit muncul atau dihilangkan sama sekali.</p>
	<p>Penelitian terdahulu ada minimalnya yaitu 3. Indikator unggul itu apa? Cari di literature lain?</p> <p>Penulisan judul.</p> <p>Konsistensi penulisan, misalnya kata menekan atau menghambat.</p> <p>Profil ditambahkan.</p>	<p>Ya.</p>
2.	<p>Prof. Dr. La Ode Harafah, SE.</p> <p>Saran. Dari sekian diskusi masih ada lambahan. Cermati, tata tulis seperti di halaman abstrak. Di halaman 5 ada kata program yang tidak tepat Perlu penelitian terdahulu agar ada pembandingan dalam penelitian ini.</p> <p>Pemakaian abjad yg kurang tepat dan konsistensi.</p> <p>Kalau bisa penguji dan pembimbing hanya melihat hal-hal yang substansial saja.</p>	
	<p>Apa masalah penelitiannya?</p> <p>Apa salah satu factor pendukung yang sangat besar?</p> <p>Sdm apa yang berpengaruh?</p> <p>Bapak melihat SDM berkualitas dari aspek saja?</p> <p>Apakah SDM bapak lihat juga dalam aspek pendidikan shg mempengaruhi sikap dan perilaku</p>	<p>Bagaimana implementasi kebijakan. Tentunya dalam implementasi kebijakan ini ada factor-faktor yang mempengaruhi.</p> <p>Dalam penelitian ini harus ditegaskan adanya komunikasi. Salah komunikasi, dan salah sasaran maka kebijakan itu tidak dapat berhasil.</p>

No.	Diskusi/Pertanyaan	Jawaban
		<p>Faktor yang sangat mempengaruhi adalah dukungan pimpinan dalam program yang diturunkan dalam bentuk finansial utk masyarakat petani</p> <p>Minimal pendidikan SPMA, maksimal SI.</p>
2	<p>Mana yang dominan?</p> <p>Apakah ada temuan spesifik yang ilmiah yang dapat diterapkan? Kira-kira apa untuk Bapak</p> <p>Penelitian ini menolak teori atau mendukung teori</p> <p>Adakah jenis jeruk lain? Macam jeruk apa yang berkualitas tinggi?</p> <p>Kenapa unggul? Produk, dimanfaatkan secara local dan dapat diekspor.</p>	<p>1. Komunikasi 2. SDM 3. Sikap pelaksana 4. Peralihan</p> <p>Yang dominan adalah komunikasi? Yang kedua SDM</p> <p>Komunikasi dalam pertemuan dan penyuluhan.</p> <p>Jadi sesuai dgn penelitian yang dilakukan dan sesuai dgn kuesioner yang disebarkan adalah variabel komunikasi. Karena jika salah memberikan komunikasi maka program akan gagal.</p> <p>Mendukung teori. Sesudah itu SDM dan tata aliran.</p> <p>Kalau di Sulsel tidak ada. Jeruk siem Km jeruk siem itu sdh menjadi unggulan nasional, artinya unggul nasional yaitu mendapat dukungan dana dari manusia.</p> <p>Jeruk siem ada di tiga kabupaten</p>
3.	<p>Drs. Wawan Ruswanto</p> <p>Masukan nanti akan diberikan, masa perbaikan dan nilai akan disampaikan pada penutupan sidang.</p>	

Tangerang, 19 Mei 2011,



Santi Dewiki
NIP. 19611222 198903 2002